



DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

**#Berani
Makmur**

**#Berani
Tangkap
Banyak**

*"Peningkatan PDRB dan Penurunan
Jumlah Rumah Tangga Miskin
Kelautan dan Perikanan Berbasis
Pengelolaan SDKP yang Berkeadilan
dan Berkelanjutan"*

Renja

**RENCANA
KERJA
PERUBAHAN
2025**



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000.7.2/252/Bappeda-G. ST/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta adanya perubahan kebijakan nasional/daerah, kondisi dan kebutuhan pembangunan, serta penyesuaian anggaran, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

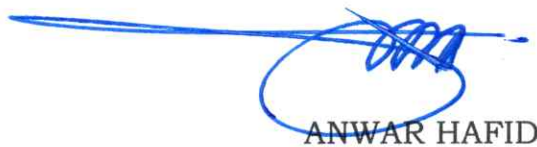
KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ... 6 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 000.7.2/252/Bappeda-9.9/2025
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

1. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Perubahan Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Perubahan Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Perubahan Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

21. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
22. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Perubahan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Perubahan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Perubahan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Perubahan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
38. Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Hidayah dan Rahmat-Nya, penulisan dan penyusunan **"Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025"** dapat terselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu acuan pelaksana kegiatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Tahun 2025.

Ranhir Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai Rencana dan Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya mensinergikan program pusat dan daerah dalam menyongsong visi dan misi pemerintah di Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan Ranhir Renja Perubahan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran membangun sangat diperlukan sebagai modal dasar perbaikan dan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di masa datang. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Palu, 15 September 2025

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



H. MOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19600418 199203 1 009

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penyusunan.....	7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng.....	19
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	21
2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng.....	21
2.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
2.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra K/L.....	28
2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah	30
2.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
2.6 Penataan Isu- Isu Strategis	33
2.7 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 38

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.1.1 Telaah Terhadap RPJMN.....	38
3.1.2 Sinergitas RPJMN, RKP, RENSTRA KKP RI dalam Mendukung Program Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	43
3.3 Program dan Kegiatan.....	44
3.4 Pendanaan Program dan Kegiatan	46
3.5 Fokus Utama Program Dan Kegiatan Tahun 2025	51
3.5.1 Sekretariat.....	51
3.5.2 Perikanan Tangkap	51
3.5.3 Perikanan Budidaya dan P2HP.....	52
3.5.4 Pengelolaan Ruang Laut.....	53

3.5.5 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	54
3.5.6 UPTD Balai Perbenihan Perikanan	55
3.5.7 UPTD PMHP	55
3.5.8 UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi P3K	56

BAB IV

PENUTUP	58
----------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Pembangunan di Daerah diwajibkan untuk dapat menyusun perencanaan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap tuntutan dari keinginan masyarakat luas di daerah masing-masing dan mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Ranhir Perubahan Renja) 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah telah memuat berbagai usulan dan rencana kerja serta program-program kegiatan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Ranhir Perubahan Renja untuk tahun 2025 ini pada dasarnya mengacu pada Ranhir RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 dan Ranwal RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029.

Menarik benang merah serta korelasi dan integrasi program dan kegiatan yang terpadu, sangat diperlukan lompatan pemikiran dalam penyusunan Rencana Kerja yang mumpuni, akuntabel, terupdate, dengan memperhatikan tolak ukur program/kegiatan berdasarkan output, outcome, benefit, dan impact dari berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengusung visi dan misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan cepat, baik dan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Guna dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah daerah Sulawesi Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah kemudian menyusun Ranhir Perubahan Renja untuk tahun 2025. Diharapkan dengan perencanaan yang baik dapat menjalankan program pembangunan daerah Sulawesi Tengah dengan cepat dan tepat sasaran.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 26. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
 27. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042;
 28. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan;
 29. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 30. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 31. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
 32. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;

33. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
34. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Ranhir Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan arah bagi pencapaian sasaran pembangunan melalui penetapan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Tujuan penyusunan Ranhir Perubahan Renja tahun 2025 adalah:

- a. Sebagai pedoman perencanaan bidang kelautan dan perikanan dalam mencapai sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025 yang mengacu pada Ranhir RPJMD 2026-2029 dan Rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2026-2029.
- b. Memberi penajaman orientasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA. 2024 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja TA. 2024 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
 - 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
 - 2.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 2.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra K/L
- 2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 2.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.6 Penentuan Isu-isu Strategis
- 2.7 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Pendanaan Program dan Kegiatan 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA. 2024 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja TA. 2024

Keberhasilan tujuan dan sasaran diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tahun 2024 DKP Sulteng telah menetapkan 3 sasaran strategis (SS) dan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai, yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Perikanan	103,86	93,74	90,26
2	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	2. Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	72,40	71,85	99,24
3	Terwujudnya Kawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,1847	0,1891	102,38
		4. Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP thd peraturan Per UU	83,98	93,49	111,32

* angka sementara

2.1.1 Analisis capaian kinerja

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis (SS) tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

SS 1: Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan

❖ IKU 1 Nilai tukar perikanan (NTNP)

merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani perikanan. NTP diperoleh dari hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada sektor perikanan (nelayan dan pembudidaya). NTP di atas angka 100 dapat diartikan bahwa petani perikanan mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga), NTP sama dengan 100 berarti petani perikanan mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTP di bawah 100 berarti petani perikanan mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan/pembudidaya (Ib).

Mulai Januari 2020 dilakukan perubahan tahun dasar penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun dasar (2012=100) menjadi tahun dasar (2018=100) baik untuk It maupun Ib. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan indeks harga 2018=100 dibandingkan dengan indeks harga 2012=100, khususnya mengenai paket komoditas maupun diagram timbang pada masing-masing subsektor yakni Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Pada Subsektor Perikanan, diagram timbang dibangun dari Kegiatan Penangkapan Ikan maupun Kegiatan Budidaya Ikan.

Tahun 2024 target Nilai Tukar Perikanan 103,86 dan terealisasi sebesar 93,74 atau 90,26%. Capaian ini tidak mencapai target.

Tabel 2.2 Capaian Nilai Tukar Perikanan (NTNP)
Sulawesi Tengah Tahun 2024

Bulan	Indeks harga yang diterima petani perikanan (It)	Indeks harga yang dibayarkan petani perikanan (Ib)	NTNP
Januari	111,19	119,68	92,91
Februari	110,44	119,13	92,71
Maret	113,4	120,24	94,31
April	114,32	120,76	94,67
Mei	112,02	120,92	92,64
Juni	114,72	121,4	94,5
Juli	106,95	115,08	92,93
Agustus	106,88	114,96	92,97
September	114,74	120,98	94,84
Oktober	114,49	120,97	94,64
November	112,52	120,8	93,15
Desember	114,52	121,11	94,56
Rata-rata	112,18	119,67	93,74

Nilai Tukar Perikanan (NTNP) berfluktuasi sepanjang tahun 2024. Secara keseluruhan indeks harga yang dibayar petani perikanan (Ib) lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks harga yang diterima petani perikanan (It). Beberapa hal yang menyebabkan penurunan ini, yakni meningkatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya harga obat/pakan, meningkatnya harga produksi, terbatasnya ketersediaan BBM bersubsidi, meningkatnya biaya transportasi, cuaca yang tidak menentu dan lain sebagainya.

Sasaran 2 Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan

❖ IKU 2 Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Nilai AKI diperoleh berdasarkan penghitungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) menggunakan 4 (empat) kelompok jenis ikan dan udang segar/basah, kelompok ikan dan udang awetan dan kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan. Untuk kelompok ikan dan udang awetan, kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan dikonversi ke dalam bentuk ikan setara segar.

Target Angka Konsumsi Ikan yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 72,40 Kg/kap/th dan terealisasi dengan angka sementara 71,85 Kg/Kap/Th* atau 99,24%. Capaian ini diperkirakan masih akan naik dengan selesainya proses penghitungan AKI Nasional pada awal semester II. Bila dilihat capaian ini lebih tinggi daripada target AKI Nasional yaitu sebesar 65,64 Kg/Kap/Th.

Kebutuhan terbesar ikan konsumsi rumah tangga selama tahun 2024 antara lain ikan selar, cakalang, dencis, kembung, lema, banyar, tongkol, matang, ekor kuning, teri basah, bandeng dan mujair.

Sasaran 3 Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

❖ IKU 3 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Pengembangan kawasan konservasi perairan daerah merupakan salah satu amanat UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Berdasarkan KEPMEN-KP NO. 50 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol, Tolitoli, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah, KEPMEN-KP NO. 51 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 52 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali, Morowali Utara, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 53 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, status kawasan konservasi Sulawesi Tengah seluas 1.338.291,55 Ha. Data ini merupakan hasil dari konsultasi publik

dan penyamaan data dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP-RI) Tahun 2019.

Tahun 2024 target rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah 0,1847 dan terealisasi 0,1891 atau sebesar 102,38%. Luas perairan Sulawesi Tengah sebesar 74.460,39 Km² dan luas kawasan konservasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 14.082,92 Km². Kawasan konservasi perairan Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Kawasan Konservasi Perairan di Sulawesi Tengah s.d. 2024

No.	KKP3K	Kabupaten	Luas (ha)	Kegiatan
1.	DOBOTO	Donggala	1.192,34	Rehabilitasi Terumbu Karang dan Mangrove
		Toli-toli	56.250,08	Pengembangan Informasi Kawasan
		Buol	17.320,30	Sosialisasi Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi Terumbu Karang
LUAS KAWASAN			74.762,72	
2.	TOMINI	Parigi Moutong	131.693,59	Pengembangan Informasi Kawasan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove
		Poso	282,87	Pengembangan Informasi Kawasan
		Tojo Una-Una	7.563,40	Pengembangan Informasi Kawasan
LUAS KAWASAN			139.539,87	
3.	DALAKA	Banggai	111.253,93	Pengembangan Rehabilitasi Terumbu Karang
		Banggai Kepulauan	151.273,94	Pengaturan Waktu Penangkapan Gurita di Kawasan Konservasi
		Banggai Laut	633.620,99	Pengaturan Waktu Penangkapan Gurita di Kawasan Konservasi
LUAS KAWASAN			896.148,86	
4.	MOROWALI	Morowali	257.612,03	Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Sosialisasi Jenis Hewan dilindungi
		Morowali Utara	41.983,07	Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Sosialisasi Jenis Hewan dilindungi
LUAS KAWASAN			299.595,10	
LUAS TOTAL			1.408.291,55	

❖ *IKU 4 Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan (%)*

Nilai ini merupakan persentase dari jumlah usaha kelautan dan perikanan yang memiliki ijin (patuh) per total keseluruhan jumlah usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa. Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 83,98% dan terealisasi 93,49% atau sebesar 111,32%. Pada tahun 2024 terdapat 449 pelaku usaha yang diperiksa dan yang patuh sebanyak 418 pelaku usaha.

Selanjutnya, upaya peningkatan kesadaran perijinan ini akan terus dilakukan baik melalui pendampingan, sosialisasi maupun pengawasan. Berikut nama jenis perijinan bidang kelautan dan perikanan serta jumlahnya di Sulawesi Tengah:

Tabel 2.4 Jumlah Persentase Keseluruhan Capaian Tiap Indikator Kinerja dan Kepatuhan Pelaku Usaha yang diperiksa

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian%	Jumlah Unit Yang diperiksa	Jumlah Kepatuhan	Persentase Kepatuhan%
I. Jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya (unit)						
a. Kapal Penangkap Ikan di Laut	300	319	106	319	292	91,5
b. Kapal Penangkap Ikan di PUD	15	24	160	24	24	100,0
Jumlah	315	343	133	343	316	92,1
II. Jumlah Usaha Budidaya yang diperiksa kepatuhannya (unit)						
a. Budidaya Ikan di Laut	20	24	120	24	24	100,0
b. Budidaya Ikan di PUD	15	15	100	15	15	100,0
Jumlah	35	39	110	39	39	100,0
III. Jumlah Usaha P2HP yang diperiksa kepatuhannya (unit)						
Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (pelaku usaha)	40	45	113	45	45	100,0
Jumlah	40	45	113	45	45	100,0
IV. Jumlah Pemanfaat Kawasan Ruang Laut Sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya (unit)						
Jumlah Pemanfaatan Kawasan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya	15	22	147	22	18	81,8
Jumlah	15	22	147	22	18	81,8
Jumlah Total	405	449	502	449	418	374
Persentase Kepatuhan						93,49

2.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelum

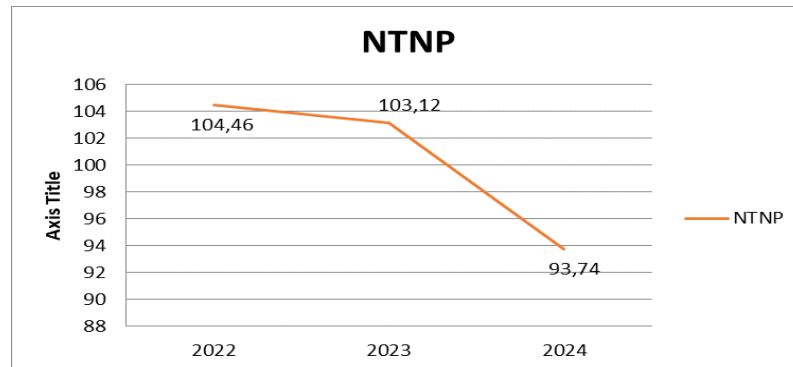
Capaian tahun 2024 ini akan dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022. Perbandingan capaian IKU DKP tahun 2024, 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 s/d 2024

No	sasaran	Indikator Sasaran	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi*	% capaian
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha KP	Nilai Tukar perikanan (NTNP) (%)	100,00	104,46	104,46	100,80	103,12	102,30	103,86	93,74	90,26
2	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	55,39	67,36	121,61	57,05	71,85	125,94	72,40	71,85	99,24
3	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan thd total luas perairan teritorial	-	-	-	-	-	-	0,1847	0,1891	102,38
		Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP thd peraturan Per UU	-	-	-	-	-	-	83,98	93,49	111,32

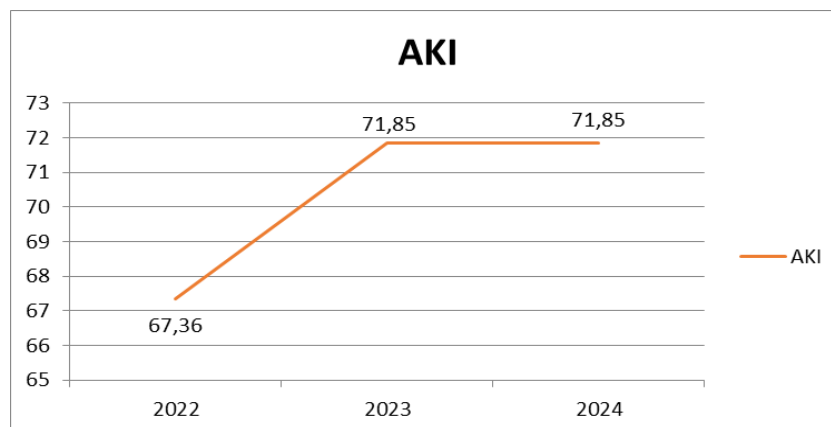
- *Nilai Tukar Perikanan (NTNP)*, Perkembangan NTNP Perikanan Sulteng bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (q to q), NTNP Sulteng cenderung turun. Sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 NTNP Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan. Tahun 2022 NTNP 104,46 dan tahun 2023 NTNP 103,12, mengalami penurunan 1,28%. Tahun 2023 NTP sebesar 103,12 dan Tahun 2024 sebesar 93,74 mengalami penurunan sebesar 9,10%. Grafik NTNP tahun 2022 s/d 2024 dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 2.1 NTNP Sulteng Tahun 2022 – 2024



- *Angka Konsumsi Ikan (AKI)*, capaian untuk indikator ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2022 sampai tahun 2024. AKI tahun 2023 sebesar 71,85 naik 6,67% dari tahun 2022. Tahun 2024 masih menggunakan angka sementara yakni 71,85. Nilai ini sama dengan tahun sebelumnya, karena AKI untuk tahun 2024 masih dalam proses penghitungan dipusat. Grafik AKI 2022 – 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 2.2 AKI Sulteng Tahun 2022 – 2024



- *Rasio Kawasan Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial*, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena satuan target yang berbeda.
- *Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan*, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Indikator ini baru ada di tahun 2024 ini.
- Tahun 2024 DKP memiliki sasaran sebanyak 3 (tiga) dan indikator kinerja sebanyak 4 (empat). Tahun 2023 dan 2022 DKP memiliki sasaran sebanyak 5 (lima) dan indikator kinerja sebanyak 6 (enam).

C. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Tahun 2024 terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 DKP Sulteng dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dg Target Jangka Menengah di Renstra 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha KP	Nilai Tukar Perikanan (NTNP) (%)	93,74	103,93	90,19
2	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	71,85	73,4	97,89
3	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan thd total luas perairan teritorial	0,1891	0,1884	100,37
		Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP thd peraturan Per UU	93,49	87,98	106,26

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Tingkat kemajuan capaian indikator *Nilai Tukar Perikanan (NTNP)* tahun 2024 hanya mencapai 90,19% dari target Renstra tahun 2026. Jika melihat capaian dari tahun-tahun sebelum, NTNP Sulteng memang sangat berfluktuasi mengingat banyak faktor teknis yang mempengaruhi. Besar harapan kedepannya NTNP Sulteng akan meningkat dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui program-program bantuan kepada nelayan dan pembudidaya;
2. Tingkat kemajuan capaian indikator *Angka Konsumsi Ikan (AKI)* sebesar 97,89% dari target renstra tahun 2026. Tetapi angka ini masih merupakan angka sementara karena AKI 2024 masih dalam proses perhitungan. AKI 2024 diperkirakan akan melebihi angka sementara yaitu 71,85 kg/kap/th, karena jika melihat capaian AKI pada tahun-tahun sebelum, AKI Sulteng selalu melebihi target daerah maupun target nasional;
3. Tingkat kemajuan capaian indikator *Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial* telah melebihi target renstra tahun 2026 yakni 100,37%, dimana target adalah 0,1884 dan capaian sebesar 0,1891. Kedepannya angka ini akan terus meningkat mengingat program dan kegiatan konservasi yang terus dilakukan oleh DKP Sulteng;
4. Tingkat kemajuan capaian indikator *Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan* telah melebihi target renstra tahun 2026 yakni 106,26%. Keberhasilan kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DKP baik dalam pendampingan, sosialisasi dan bantuan-bantuan yang diberikan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Standar Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja utama (IKU) DKP Sulteng tahun 2024 dengan capaian Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.4 Perbandingan Capaian IKU Dinas dengan
Capaian Nasional Tahun 2024

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi Nasional 2024*	% Capaian
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha KP	Nilai Tukar Perikanan (%)	93,74	101,81	92,07
Meningkatnya angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan (Kg/kap/th)	71,85	58,91	121,97
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan thd total luas perairan territorial	0,1891	0,042	450,24
	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP thd Peraturan Per-UU	93,49	97,96	95,44

*) angka sementara

Perbandingan capaian IKU Dinas dan Capaian nasional Tahun 2024:

1. Dari tabel diatas dapat dilihat capaian NTNP Nasional lebih tinggi dari capaian NTP Sulawesi Tengah. Dimana capaian nasional sebesar 101,81 dan capaian Sulawesi Tengah hanya 93,74. Secara keseluruhan indeks harga yang dibayar petani perikanan (Ib) lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks harga yang diterima petani perikanan (It). Beberapa hal yang menyebabkan penurunan ini, yakni meningkatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya harga obat/pakan, meningkatnya harga produksi, terbatasnya ketersediaan BBM bersubsidi, meningkatnya biaya transportasi, cuaca yang tidak menentu dan lain sebagainya;
2. Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Ditjen Penguatan Daya Saing (DJPDS) menetapkan target nasional untuk indikator *angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)* sebesar 59,00 dan tercapai sementara 58,91* sedangkan target DKP Sulteng sebesar 72,40 dan tercapai 71,85*. Jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian konsumsi makan ikan Sulteng sudah melebihi target nasional. Untuk skala nasional Sulawesi Tengah menempati peringkat ke-5 (lima) capaian angka konsumsi ikan. Provinsi dengan capaian tertinggi secara berturut-turut adalah Maluku, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
3. Tahun 2024 indikator *rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial*, perbandingan kawasan konservasi yang ditetapkan terhadap jumlah kawasan perairan Sulawesi Tengah lebih tinggi 450% jika dibandingkan dengan luas wilayah konservasi nasional terhadap total luas

wilayah perairan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh komitmen DKP Sulteng dalam melakukan kegiatan konservasi dan jumlah UPTD konservasi sebanyak 7 wilayah;

4. Capaian indikator *Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan* Sulawesi lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional yakni 95,44%. Sekalipun capaian nasional lebih tinggi akan tetapi capaian Sulteng telah melebihi 111,32% dari target daerah yang ditetapkan.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja DKP Sulteng tahun 2024 sebesar 100,80%. Dari 4 (empat) indikator yang ada 2 (dua) indikator melebihi target atau dengan capaian diatas 100% dan 2 (dua) lagi tidak mencapai target. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja DKP Sulteng, antara lain:

1. **Nilai Tukar Perikanan**, persentase capaian untuk indikator ini hanyalah 90,26%. Beberapa 100,8 dan terealisasi sebesar 103,12. Capaian ini melebihi target sebesar 102,30%. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan ini, yakni meningkatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya harga obat/pakan, meningkatnya harga produksi, terbatasnya ketersediaan BBM bersubsidi, meningkatnya biaya transportasi, cuaca yang tidak menentu dan lain sebagainya;
2. **Angka Konsumsi Ikan**, persentase capaian indikator ini sebesar 99,24%. Angka ini masih merupakan angka sementara karena AKI 2024 masih dalam proses perhitungan. AKI 2024 diperkirakan akan melebihi angka sementara yaitu 71,85 kg/kap/th, karena jika melihat capaian AKI pada tahun-tahun sebelum, AKI Sulteng selalu melebihi target daerah maupun target nasional;
3. **Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial**, persentase capaian untuk indikator ini melebihi target yang ditetapkan, yakni 102,38%. Beberapa hal yang menyebabkan pencapaian ini antara lain komitmen DKP Sulteng dalam melakukan kegiatan konservasi dan jumlah UPTD konservasi sebanyak 7 wilayah;
4. **Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**, capaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan, yakni 111,32%. Keberhasilan kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DKP baik dalam pendampingan, sosialisasi dan bantuan-bantuan yang diberikan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Salah satu tupoksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat unit-unit kerja yang menangani langsung hubungan kepada masyarakat, yaitu: (1) Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Budidaya dan P2HP, Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) mengurus masalah perizinan usaha perikanan sesuai kewenangan; (2) UPT PMHP (Penerapan Mutu Hasil Perikanan), menangani sewa uji mutu hasil perikanan; (3) UPT Balai Perbenihan, melalui retribusi penjualan produk usaha daerah dengan menyediakan induk dan benih ikan dan udang serta ikan dan udang; (4) UPT Wilayah I sampai dengan VII menangani masalah Pelayanan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan.

Berikut prosedur operasional dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang menangani pelayanan publik;

a. Bidang Budidaya dan P2HP, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang PRL

Bidang Budidaya dan P2HP, Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang PRL memfasilitasi masalah perijinan dan non perijinan kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi di Sulawesi Tengah.

b. UPTD Balai Perbenihan Perikanan

UPTD Balai Perbenihan Perikanan di Sulawesi Tengah memiliki dua sub bagian yang menjadi prioritas, yaitu Perbenihan Ikan Air Tawar dan Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut. Perbenihan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, sertifikasi perbenihan Air Tawar dan penyajian serta bimbingan pemanfaatan teknologi anjuran bidang pembenihan air tawar. Dalam pelaksanaan tupoksi perbenihan air tawar didukung oleh 9 (sembilan) unit perbenihan sebagai berikut: (1) BBIS Kalawara (2) BBI Tulo (3) BBI Maenusi (4) BBI Lauwa (5) BBI Wuasa (6) Kolam Langaleso (7) Kolam Pakuli (8) BBI Tonusu (9) BBI Bolapapu. Pada BBI dan Kolam tersebut dikembangkan komoditas-komoditas unggulan sebagai berikut :

- 1) Ikan Mas
- 2) Nila
- 3) Ikan Lele
- 4) Ikan Mas Konsumsi
- 5) Ikan Nila Konsumsi

Untuk mengoptimalkan kegiatan usaha, perbenihan perikanan air payau dan laut mempunyai tugas melakukan pembinaan operasional, menyampaikan dan memberikan bimbingan pemanfaatan dengan teknologi anjuran di bidang pembenihan ikan air payau dan laut dimana berlokasi di : (1) BBAP Kampal (2) BBAP Tindaki dan (3) HSRT Mamboro.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, UPTD Balai Perbenihan melayani pembelian benih ikan air tawar, benur udang dan ikan konsumsi dimana masyarakat dapat langsung melakukan transaksi di unit perbenihan bersangkutan. Output dari pembelian benih, benur dan ikan konsumsi itu akan menjadi sumber PAD yang dihasilkan oleh UPTD Balai Perbenihan Perikanan bagi Sulawesi Tengah.

c. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan untuk sektor bidang perikanan tangkap yang bergerak pada obyek pelayanan masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPTD ini mengelola unit Pangkalan Pendaratan Ikan yang berada di beberapa Kabupaten sebagai tempat operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Sulawesi Tengah. PPI yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 10 lokasi, dimana 6 (enam) Pelabuhan sampai dengan tahun 2024 telah beroperasi yaitu: PP Donggala, PP Ogotua, PPI Paranggi, PPI Pagimana, PP Kolonedale dan PPI Mato. Pelabuhan-pelabuhan ini melakukan pelayanan-pelayanan antara lain:

1. Penjualan es balok
2. Sewa Cold Storage
3. Penyewaan Lapak Ikan dan Sayur
4. Layanan Tambat Labuh
5. Layanan Mess Nelayan
6. Perbaikan Jaring
7. Penyewaan Kantin
8. Layanan Air Bersih
9. Penyewaan Gudang
10. Penyewaan Gedung Aula
11. Sewa Tempat Ruang Terbuka

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan selama kurun waktu 2016 – 2021 memberikan dampak positif dan manfaat, akan tetapi tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi.

Berdasarkan tugas dan fungsi, dalam pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yakni:

Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang relatif masih rendah	• Nilai Tukar Nelayan yang cenderung menurun setiap tahunnya • Nilai Tukar Pembudidaya yang masih berfluktuatif dengan rata-rata capaian pertahunnya 89,48%	• Kualitas SDM yang belum merata • Tingginya biaya operasional dibandingkan pendapatan
2	Masih rendahnya produksi dan produktifitas perikanan	Rasio rata-rata capaian pertahun perikanan budidaya dan perikanan tangkap masing-masing sebesar 0,88	• Kualitas SDM Pelaku usaha yang belum merata • Masih kurangnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi teknis • Belum optimalnya sarana prasarana pendukung produksi perikanan • Masih didominasi oleh perikanan skala kecil/ teknologi sederhana • Sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas • Sistem pendataan dan informasi yang belum terintegrasi • Keterbatasan BBM bersubsidi dan es • Tranformasi teknologi serta inovasi yang belum berjalan baik • Infrastruktur kepelabuhanan yang belum mendukung • Konflik kepentingan dengan pengguna lain • Masih terbatasnya luasan tambak garam terintegrasi dan masih bersifat tradisional
3	Rendahnya daya saing produk perikanan	• Kontribusi PDRB Perikanan yang cenderung menurun • Masih terbatasnya akses permodalan • Persentase produk olahan yang dihasilkan dibandingkan produksi yang ada < 1% • Belum optimalnya sistem logistik	• SDM aparatur dan pelaku usaha yang belum merata • Mayoritas Pelaku Usaha belum memiliki jaminan usaha • Penanganan pasca panen dan penanganan ikan dikapal yang masih konvensional • Keterbatasan sarana prasarana logistik dan pengolahan • Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha
4	Pengawasan dan penegakan hukum yang belum efektif dan efisien	• Tingkat kepatuhan pelaku usaha masih dibawah 100% • Peraturan yang sering berubah dan tumpang tindih	• jumlah PPNS dan pengawas SDKP terbatas • Masih maraknya IUU Fishing • Sistem perijinan belum efektif dan efisien • Mahalnya biaya operasi pengawasan • Kurangnya sarana prasarana penegakan hukum
5	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal	• Rasio kawasan lindung masih rendah, dibawah 20% • Masih banyaknya regulasi pengelolaan ruang laut yang tumpang tindih dan belum optimal • Pemanfaatan ruang laut yang belum sesuai zonasi	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP berkelanjutan • Infrastruktur dasar serta sarana prasarana terutama di pulau-pulau kecil baik bagi aparaturnya maupun masyarakat yang masih terbatas • Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove, lamun, terumbu karang) • Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
6	Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan	Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dengan efektif dan efisien	- Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten - Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko - Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP - Keterbatasan sarana prasarana aparatur terutama pada unit-unit pelaksana teknis

Dari identifikasi pada tabel diatas dirangkum akar-akar permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas SDM Pelaku usaha yang relatif rendah
2. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang belum optimal
3. Belum optimalnya sarana prasarana serta infrastruktur pendukung produksi
4. Masih didominasi oleh perikanan skala kecil/ teknologi sederhana
5. Transformasi teknologi serta inovasi yang belum berjalan baik
6. Sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas
7. Keterbatasan BBM bersubsidi dan es
8. Tingginya biaya operasional dibandingkan pendapatan
9. Sistem pendataan dan informasi yang belum terintegrasi
10. Konflik kepentingan dengan pengguna lain
11. Masih terbatasnya luasan tambak garam terintegrasi dan masih bersifat tradisional
12. Mayoritas Pelaku Usaha belum memiliki jaminan usaha
13. Penanganan pasca panen dan penanganan ikan dikapal yang masih konvensional
14. Keterbatasan sarana prasarana logistik dan pengolahan
15. Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha
16. Masih maraknya IUU Fishing
17. Sistem perijinan belum efektif dan efisien
18. Mahalnya biaya operasi pengawasan
19. Kurangnya sarana prasarana penegakan hukum
20. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP berkelanjutan
21. Infrastruktur dasar serta sarana prasarana terutama di pulau-pulau kecil baik bagi aparaturnya maupun masyarakat yang masih terbatas
22. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove, lamun, terumbu karang)
23. Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang
24. Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko
25. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP
26. Keterbatasan sarana prasarana aparatur terutama pada unit-unit pelaksana teknis

2.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2045 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029, ditetapkan dengan rumusan:

“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”

Visi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sulawesi Tengah: adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang disahkan pada 23 September 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1 kota.

Sebagai penjabaran **Visi** RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029, maka dirumuskan **Misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat dipakai untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menjadi input dalam perumusan isu-isu strategis dalam pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.7. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju				
No	Misi dan Program Gubernur Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2: Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dengan efektif dan efisien Rasio rata-rata capaian pertahun perikanan budidaya dan perikanan tangkap masing-masing sebesar 0,88 Kontribusi PDRB Perikanan yang cenderung menurun Masih terbatasnya akses permodalan Persentase produk olahan yang dihasilkan dibandingkan produksi yang ada < 1% Belum optimalnya sistem logistik perikanan	a) Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten b) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP c) Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko d) Keterbatasan sarana prasarana aparatur yang memadai terutama pada UPT e) Sarana prasarana yang ada masih terbatas dan sebagian besar yang telah ada masih konvensional f) Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang belum optimal g) Kualitas SDM Pelaku usaha yang belum merata h) Keterbatasan akses pakan, benih, es serta BBM bersubsidi menyebabkan biaya produksi yang besar i) Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik dan efisien j) Ketersediaan data dan informasi yang belum terintegrasi k) Pemahaman mengenai system jaminan mutu yang masih kurang l) Mayoritas pelaku usaha masih menggunakan teknologi tradisional m) Mayoritas usaha yang dijalankan masih memiliki resiko tinggi n) Kelembagaan pelaku usaha yang belum optimal o) Masih maraknya	a) Adanya payung hukum yang jelas terhadap tupoksi untuk pelayanan umum; b) Peluang untuk sertifikasi ISO 9001:2015 c) Sebagian besar sarana dan prasarana telah ada hanya memerlukan pemeliharaan d) Teknologi informasi yang semakin mudah e) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan untuk kemajuan sektor kelautan dan pemerintah f) Terbangunnya kesadaran aparatur akan pentingnya pelayanan g) Adanya keinginan pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya h) Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar i) Ketersediaan teknologi pakan ikan j) Penataan wilayah sistem logistik ikan k) Rekstruktisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi l) Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju				
No	Misi dan Program Gubernur Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			konflik kepentingan antar pengguna	
3	Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor	a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha masih dibawah 100% b. Rasio kawasan lindung masih rendah, dibawah 20% c. Masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan belum optimal d. Pemanfaatan ruang laut yang belum sesuai zonasi	a. Sarana prasarana pengawasan serta pengelolaan ruang laut yang ada masih terbatas b. Kualitas dan kuantitas SDM Pengawas dan pengelola ruang laut yang relatif rendah c. Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien d. Mahalnya biaya operasi pengawas e. Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i> f. Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang	a) Komitmen pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan SDKP b) Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut c) Adanya Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu d) Rekstrukturisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi e) Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak f) telah terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam dokumen RTRW

Dari 4 Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 2 Misi yang didukung oleh pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, yakni:

Misi 2: Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Misi ini Perwujudan dari masyarakat Sulawesi Tengah yang bahagia dan produktif dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah, PDRB sektor unggulan daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif memerlukan peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya nilai investasi daerah, PDRB sektor industri pengolahan, pendapatan asli daerah dan daya saing serta produktivitas ekonomi sektoral.

Selain itu, pembangunan ekonomi berkelanjutan tersebut juga memerlukan penguatan sektor unggulan yang merupakan tulang punggung perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam upaya meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah tersebut bertumpu pada sasaran meningkatnya PDRB sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pariwisata serta meningkatnya peran koperasi dan UMKM. Semuanya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan juga merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang menjadi sasaran pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan antara lain menurunnya ketimpangan pendapatan antar wilayah, dalam hal ini terjadi pemerataan distribusi pendapatan, misalnya dalam hal peningkatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif atau melalui diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dengan mendorong industri baru di berbagai wilayah, sehingga dapat membantu meningkatkan PDRP Per Kapita di Provinsi Sulawesi Tengah.

Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor. Dalam upaya mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi konektivitas antar wilayah dan antar sektor dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan konektivitas serta pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas utama, dengan beberapa sasaran antara lain meningkatnya pengelolaan sampah dan luas penanaman tanaman. Kemudian, sasaran lainnya yaitu meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati daerah. Keanekaragaman hayati merupakan fondasi ekosistem yang sehat, yang tidak hanya mendukung kehidupan flora dan fauna, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat. Sasaran penting lainnya yaitu menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.

Selain meningkatkan kualitas lingkungan hidup, tujuan lainnya dalam pencapaian misi ini yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas, yang merupakan indikator penting dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Sasaran dari tujuan ini mengarah pada meningkatnya kondisi jalan baik, akses hunian layak dan sanitasi rumah tangga, kondisi simpul transportasi serta kondisi irigasi dan sumber daya air. Infrastruktur dasar mencakup fasilitas penting yang mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, sementara konektivitas mengacu pada kemudahan akses dan keterhubungan antar wilayah.

Tujuan terakhir yaitu bagaimana meningkatkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi melalui sasaran meningkatnya akses terhadap informasi dan komunikasi. Peningkatan dimaksud dalam hal akses, konektivitas dan pemanfaatan teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam mendorong transformasi digital pada berbagai aspek kehidupan termasuk pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, mendorong efisiensi ekonomi serta pemerataan akses informasi dan layanan publik yang lebih efisien dan transparan melalui implementasi e-government di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sinergi dari peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan konektivitas serta pembangunan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

2.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dengan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra K/L

Telaahan terhadap Renstra K/L dan SDKP Provinsi perlu dilakukan untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sarana Renstra OPD.

Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PDB Perikanan (%)	Kualitas SDM Aparatur yang masih relatif rendah	p) Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten	m) Adanya payung hukum yang jelas terhadap tupoksi untuk pelayanan umum;
2	Produksi perikanan (ton)		q) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP	n) Peluang untuk sertifikasi ISO 9001:2015
3	a) Perikanan tangkap		r) Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko	o) Sebagian besar sarana dan prasarana telah ada hanya memerlukan pemeliharaan
4	b) Perikanan budidaya		s) Keterbatasan sarana prasarana aparatur yang memadai terutama pada unit-unit pelaksana teknis	p) Teknologi informasi yang semakin mudah
5	Produksi garam rakyat (juta ton)			
6	NTN/NTPi (%)			
7	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)			
8	Konsumsi ikan (kg/kap/th)	- Infrastruktur dasar yang masih kurang terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil - Sistem pendataan dan akses informasi yang belum optimal	a) Luasan dan kontur wilayah Sulawesi Tengah yang beragam	a) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan pemerintah
9	Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola (pulau)		b) Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat	b) Kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan yang memadai untuk diberdayakan
10	Wilayah perairan bebas IUU fishing (%)		c) Pemahaman tentang pentingnya data yang masih kurang	
	Jumlah kasus penolakan ekspor per Negara mitra (kasus)	- Kualitas SDM Pelaku Usaha Perikanan yang masih relatif rendah - Belum optimalnya kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan - Masih kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan	d) Kualitas dan kuantitas SDM Pengelola data informasi yang relatif masih lemah	
	Jumlah hasil litbang yang inovatif (hasil litbang)		e) Keterbatasan sarana prasarana pengolahan informasi dan data kelautan dan perikanan	
	Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih dan disuluh yang kompeten di bidang KP (%)		a) Rendahnya tingkat pendidikan SDM pelaku usaha perikanan	a) Keinginan pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidup
			b) Kemampuan kapasitas kelembagaan pelaku usaha masih terbatas	b) Adanya kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha yang dilakukan oleh OPD
			c) Masih kurangnya kepercayaan dunia perbankan pada sektor perikanan	c) Mulai banyaknya inovasi teknologi yang dilakukan bidang kelautan perikanan yang melibatkan perbankan
		Belum optimalnya sarana dan	d) Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pelaku usaha perikanan skala kecil	
			e) Tingkat suku bunga kredit yang masih relatif tinggi	
			a) Sarana prasarana yang ada	a) Komitmen pemerintah terkait

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		prasarana kelautan dan perikanan - Masih sederhananya teknologi yang diterapkan - Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu dan pakan murah berkualitas - Rendahnya daya saing produk perikanan - Belum optimalnya pemanfaatan pasar di dalam dan luar negeri - Belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan - Terjadinya konflik kepentingan dengan pengguna lain - Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas - Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan - Penegakan hukum yang masih belum efektif dan efisien - Belum optimalnya peran masyarakat dalam mengelola kawasan perairan	masih terbatas dan sebagian besar yang telah ada masih konvensional - Kualitas SDM Kelautan Perikanan yang relatif rendah - Sebagian besar pakan masih didatangkan dari luar negeri - Industri penyediaan bahan baku pakan lokal masih sangat terbatas - Mahalnya pakan mengakibatkan ongkos produksi yang besar - Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik dan efisien - Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien - Kurangnya sarana dan prasarana penegak hukum di laut - Mahalnya biaya operasi pengawas - Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i>	pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan pemerintah - Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar - Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan - Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut - Penataan wilayah sistem logistik ikan - Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu yang mulai dilakukan oleh pemerintah - pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan - Rekstrukturisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi - Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak - Telah tersusunnya Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Penguatan regulasi dan kebijakan

2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka RTRW Provinsi adalah merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi; perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

RTRW Provinsi disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah. Pertimbangan lain adalah keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir dan pemanfaatan ruang kota pantai sebagai amanah yang tercantum dalam pasal 13 pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021, dimana RTRW Provinsi juga mencakup muatan pengaturan perairan pesisir, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam

memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, upaya pembangunan provinsi mutlak ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Provinsi.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan pengutamaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu dimaksudkan pula untuk memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan RTRW Provinsi dilakukan dengan memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, dalam penyusunan RTRW Provinsi didasarkan pula pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi antara lain untuk mewujudkan pembangunan Wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, sumber daya wilayah pesisir dan kelautan, industri, pertahanan keamanan serta pariwisata yang produktif dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis Mitigasi Bencana, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi. Rencana struktur ruang wilayah provinsi mencakup sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Adapun rencana pola ruang wilayah provinsi mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis provinsi.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, dalam penyusunan RTRW Provinsi juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun, termasuk KKPRL yang menjadi pengaturan di perairan pesisir; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan zonasi sistem provinsi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 telah memiliki Dokumen RTRW baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 Tentang RTRWP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

Pengelolaan wilayah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 34 isu, maka dapat ditarik beberapa

isu menjadi 23 isu prioritas yang diprioritaskan penanganannya, yakni: 1) Mengendalikan laju degradasi ekosistem 2) Meningkatkan diversifikasi usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil 3) Mencegah dan menanggulangi erosi/abrasi pantai 4) Mengendalikan upaya pencegahan Illegal Fishing 5) Meminimalisir kerusakan hutan yang berdampak pada perubahan lingkungan pesisir 6) Meningkatkan kelestarian habitat dan ekosistem WP-3-K 7) Mengendalikan dan mengelola pencemaran lingkungan di WP-3-K 8) Membentuk, mengembangkan, dan mempertahankan kawasan konservasi di WP-3-K 9) Mewujudkan pantai bebas pencemaran oleh sampah 10) Melindungi masyarakat, Infrastruktur dan segenap aset yang ada di wilayah pesisir dari bahaya/dampak bencana dan perubahan iklim 11) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat WP-3-K 12) Mengoptimalkan potensi perikanan yang ramah lingkungan di WP-3-K 13) Meningkatkan usaha-usaha perikanan guna meningkatkan SDM 14) Meningkatkan penerapan kearifan lokal dan peran lembaga tradisional/adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 15) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola WP-3-K 16) Meningkatkan kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil 17) Meningkatkan peran armada dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 18) Meningkatkan dukungan transportasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 19) Meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan transportasi laut pulau-pulau kecil 20) Meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu 21) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana wisata WP-3-K 22) Penataan dan penegakan aturan reklamasi 23) Menanganan dampak perubahan garis pantai dan mitigasi bencana Dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, kebijakan pembangunan daerah dan nasional serta mempertimbangkan kecenderungan kondisi global, lokal dan regional telah dirumuskan visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah. Perumusan Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini telah pula memperhatikan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Tengah.

Visi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah “Terwujudnya Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Bersih, Indah, Produktif, Berdayaguna, Aman, Dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat “.Visi tersebut diatas mengandung pengertian sebagai berikut : 1. Terwujudnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Bersih 3. Indah 4. Produktif mengandung pengertian bahwa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dapat memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan, pertanian, wisata serta jasa-jasa lingkungan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. 5. Berdayaguna 6. Aman 7. Berkelanjutan

Misi rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi Tengah meliputi: a. Ekologi 1. Memelihara dan mengembangkan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Menata pemanfaatan ruang dan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Meningkatkan dan memelihara kualitas serta daya dukung

lingkungan hidup; dan 4. Meningkatkan upaya mitigasi bencana. b. Ekonomi 1. Mengembangkan potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana 3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 5. Mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 6. Meningkatkan peran sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 7. Meningkatkan lapangan kerja c. Sosial Budaya 1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Melestarikan nilai-nilai budaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan d. Kelembagaan 1. Meningkatkan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Penguatan kelembagaan antar sektor terkait dalam usaha pelestarian dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu.

Tabel 2.9 Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	meningkatkan fungsi sistem perlindungan dan pengamanan pantai dari erosi/abrasi	a. pengkajian dan pemetaan potensi daerah rawan abrasi dan sedimentasi; b. pemanfaatan perlindungan alamiah berupa mangrove dan/atau buatan dengan menambah bangunan pelindung pantai seperti <i>bronjong/groin, breakwater</i> untuk memperkuat pantai; c. peningkatan pemeliharaan pantai dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat merusak sistem perlindungan pantai, terutama faktor-faktor yang berasal dari perbuatan manusia; d. pensosialisasian pengelolaan yang baik untuk pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan mematuhi daerah sempadan pantai; e. penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang DAS; f. peningkatan keamanan pantai secara buatan/struktural; g. Pensosialisasian kawasan perlindungan pantai dan sungai di mana untuk pantai sebesar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan sungai selebar 50 m.
	Memelihara dan mengembangkan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem, melalui pengembangan pengelolaan KKP3K, KKPD, KKM dan kawasan konservasi lainnya b. peningkatan fungsi dan daya dukung DAS, melalui penyelenggaraan RHL serta pengelolaan DAS; c. pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan untuk mendukung pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan IPTEK; dan d. pengembangan perlindungan biota laut langka
3	mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	a. peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengawasan dan pengelolaan WP-3-K; dan b. pengawasan terhadap pelaksanaan RKL-RPL dan AMDAL di setiap unit industri di WP-3-K.

No	Arah Kebijakan	Strategi
4	menginisiasi pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi WP-3-K	a. penyiapan produk hukum dalam pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi; dan b. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi secara proporsional.
5	meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi W P-3-K	a. penyiapan produk hukum dalam pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi; b. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi secara proporsional; c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pantai; d. peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dari upaya konservasi; e. peningkatan pemahaman dan pengetahuan pemerintah daerah akan pentingnya penyelamatan SDA ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; peningkatan sistem informasi terkait dengan aturan dan keberadaan Taman Nasional, kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; pembangunan rencana kelola bersama antara pemerintah daerah dengan pengelola Taman Nasional, kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembangunan koordinasi pemanfaatan lahan pesisir antar pemangku kepentingan.
6	melindungi kawasan konservasi WP-3-K, suaka perairan, dan keanekaragaman hayati lainnya	a. penyiapan produk hukum dalam pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi; dan b. pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi secara berkelanjutan.
7	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim	a. peningkatan Komunikasi-Informasi-Edukasi mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim dengan ditunjang oleh bahan-bahan komunikasi yang dibutuhkan; b. peningkatan kampanye mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim melalui pendidikan formal; dan c. pengintensifan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim kepada masyarakat.
8	mengembangkan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap	a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap; b. pembinaan secara intensif melalui diseminasi dan penyediaan unit-unit percontohan perikanan budidaya yang dikelola kelompok-kelompok masyarakat dengan sistem pendampingan; c. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; d. peningkatan manajemen dan teknologi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; dan e. peningkatan manajemen dan koordinasi kawasan minapolitan.
9	mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif secara terpadu	peningkatan produktivitas dan daya saing
10	mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif pemanfaatan jasa-jasa lingkungan pesisir	a. peningkatan pemberdayaan masyarakat/ kelompok masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan pesisir melalui pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat; dan b. penggalangan kemitraan usaha antara korporasi dan masyarakat/kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata bahari.

No	Arah Kebijakan	Strategi
11	mengembangkan aneka produk pengolahan hasil kelautan dan perikanan	a. pengembangan pengolahan hasil-hasil kelautan dan perikanan; dan b. penggalangan kemitraan usaha antara swasta dan masyarakat/kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata bahari.
12	meningkatkan stok atau ketersediaan sumberdaya ikan bagi kelangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir	a. pengkajian stok (stock assessment) sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Sulawesi Tengah; b. pengevaluasian perijinan, tingkat pemanfaatan, pelaksanaan aturan jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan; dan c. pemulihan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove
13	Mengembangkan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	a. pengembangan kawasan minapolitan budidaya/tangkap melalui pengintegrasian sentra-sentra produksi menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah; b. pengembangan usaha budidaya perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; dan c. peningkatan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
14	meningkatkan transportasi laut beserta pendukungnya	pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut.
15	meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi laut dan keterpaduan antar moda dari dan ke pulau-pulau kecil	a. peningkatan jumlah angkutan laut; dan b. pembinaan usaha jasa pelayanan rakyat
16	meningkatkan sarana dan prasarana wisata bahari	a. pengembangan sarana dan prasarana wisata bahari yang berbasis masyarakat melalui kemitraan; dan b. peningkatan perencanaan wisata terpadu dengan pelibatan pemangku kepentingan secara terkoordinasi.
17	mengembangkan objek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal	a. pembangunan sistem promosi pariwisata yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan; b. pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari; c. pengsinergian pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran di kabupaten dan kota; d. pembangunan partisipasi masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang di dukung swasta; dan e. pembangunan sistem promosi pariwisata yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan.
18	mewujudkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pesisir	pengembangan dan peningkatan program pelestarian ekosistem berbasis masyarakat
19	mewujudkan pantai lestari, indah, dan bebas sampah	a. penggalangan kerja sama regional dan kerja sama antara Kabupaten di wilayah pesisir dalam upaya mengurangi beban masuknya sampah ke perairan Sulawesi Tengah; b. penggalangan aksi-aksi kebersihan pantai secara rutin melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut; c. peningkatan dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam gerakan kebersihan pantai; dan d. pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah.

No	Arah Kebijakan	Strategi
20	meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana guna mengurangi resiko bencana	a. pengidentifikasian dan merencanakan tempat dan jalur evakuasi; b. pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada untuk tempat evakuasi; c. pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas baru untuk mitigasi dan adaptasi bencana; d. peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan e. pengembangan sadar bencana
21	menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di wilayah WP-3-K	a. peningkatan kapasitas SDM masyarakat WP-3-K; b. pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif di kalangan masyarakat WP-3-K; c. pensinergian program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat WP-3-K lintas sektor dan antar level pemerintahan; d. dan penggalangan kemitraan pemberdayaan ekonomi masyarakat WP-3-K.
22	meningkatkan penerapan kearifan lokal berdasarkan tradisi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. pengkajian nilai-nilai kearifan lokal berbasis tradisi lokal dan pembinaan dalam penerapannya melalui lembaga-lembaga tradisional/adat; dan b. pengembangan dan pengintegrasian aturan-aturan/nilai-nilai/tradisi dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
23	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K	a. pengembangan sistem insentif bagi organisasi dan lembaga lokal yang berpartisipasi dalam pengelolaan WP-3-K; b. pelibatan organisasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. pelibatan pemangku kepentingan dalam menjaga keberadaan pulau-pulau kecil potensial.
24	mengurangi konflik masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K	a. pengembangan mata pencaharian alternatif; b. pengembangan solidaritas dan aksi kolektif; c. pemetaan konflik dan penyusunan zonasi wilayah pesisir dengan pelibatan pemangku kepentingan; dan d. pembangunan koordinasi antar instansi dan koordinasi antar kabupaten/ kota.
25	meningkatkan jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. peningkatan keterjangkauan/aksesibilitas pendidikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan b. perubahan paradigma masyarakat agar berorientasi pada pendidikan.
26	meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	a. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pada SMA unggulan di bidang kelautan dan/atau SMK kelautan; dan b. pengintegrasian dan mengimplementasikan materi pelajaran tentang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam kurikulum muatan lokal pada sekolah tingkat menengah atau sederajat.

No	Arah Kebijakan	Strategi
27	meningkatkan kesejahteraan masyarakat di WP-3-K	a. pemberdayaan perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam usaha pengolahan hasil perikanan; b. pengembangan usaha budidaya air payau dan air laut di WP-3- K; c. pengembangan produksi pangan di pulau-pulau kecil; d. pengembangan pengolahan dan konsumsi pangan alternatif; e. peningkatan akses pangan masyarakat; f. peningkatan akses masyarakat pesisir terhadap sarana prasarana kesehatan dan ekonomi; dan g. peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal.
28	meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah	a. penguatan komitmen Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan DPRD untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan manajemen penanggulangan bencana melalui pembentukan lembaga khusus Penanggulangan Bencana Daerah sesuai amanat peraturan perundangan; b. penguatan kebijakan dan manajemen bencana dengan dukungan sumberdaya manusia yang profesional; c. monitoring dan evaluasi kecakapan lembaga dalam melakukan mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim; d. Penguatan kemampuan institusi untuk implementasi kebijakan penanganan bencana dan dampak perubahan iklim; e. penguatan komitmen, kesepahaman dan kerja sama yang kuat mengenai peran dan tanggung jawab institusi di luar lingkungan Pemda dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim; f. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana serta melengkapi dan menyempurnakan SOP yang telah ada; g. penyusunan peraturan daerah yang diperlukan untuk menunjang upaya mitigasi dan penanggulangan bencana secara efektif;
29	meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K	a. pengembangan dan penguatan lembaga-lembaga lokal dalam pengelolaan WP-3-K; dan b. pengembangan aspek pasar dan peningkatan nilai tambah produk.
30	meningkatkan manajemen organisasi dan usaha kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	a. pendataan dan pemetaan yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; b. pembinaan manajemen organisasi; dan c. Penyediaan fasilitas/ sarana/ prasarana
31	menyediakan peraturan perundang-undangan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku	a. pengkajian akademik penataan hukum pengelolaan WP3K di daerah; b. penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub mengenai pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai penjabaran dari peraturan perundangan; c. pembangunan komitmen DPRD untuk mengakomodasi proses legislasi pembentukan peraturan daerah mengenai pengelolaan WP-3-K; dan d. pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam proses pembuatan produk hukum.

Sumber : RSWP-3K Sulteng

2.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategi

a) Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW terkait Tugas & Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dislutkan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sinkronisasi ruang darat dan laut	- Infrastruktur dasar yang masih kurang terutama di wilayah pesisir dan PPK - Belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan dan perikanan - Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait pengendalian pemanfaatan SDKL - Terjadinya konflik kepentingan dengan pengguna lain - Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas - Penegakan hukum yang masih belum efektif dan efisien	- Luasan dan kontur wilayah Sulawesi Tengah yang beragam - Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat - Keterbatasan sarana prasarana pengolahan informasi dan data kelautan dan perikanan - Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien - Kurangnya sarana dan prasarana penegak hukum di laut - Mahalnya biaya operasi pengawas - Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i>	- Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar - Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut - Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan pemerintah; - Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu yang mulai dilakukan oleh pemerintah - Pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan - Rekstruktisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi - Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak - Telah tersusunnya materi teknis perairan pesisir yang terintegrasi dengan ruang darat dalam RTRWP Sulteng 2023-2042 - Penguatan regulasi dan kebijakan (telah terbitnya Perda no. 5 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan

2.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari gambaran pelayanan dinas, sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah pada renstra PD, implikasi RTRW bagi pelayanan PD dan implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Tabel 2.11 Identifikasi Isu Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Isu lingkungan	- Degradasi kondisi ekosistem lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil - Masih maraknya pencurian terumbu karang dan pengebangan mangrove - Pencemaran wilayah pesisir yang diakibatkan oleh aktifitas kegiatan pertambangan	- Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal - Kualitas SDM - Koordinasi antar instansi belum optimal - Sistem pendataan dan akses informasi yang masih terbatas	
2	Isu Illegal fishing	- Penurunan stok ikan <i>Overfishing</i> akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat	- Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan masih terbatas - Konflik kepentingan dengan pengguna lain - Penegakan hukum yang masih belum efektif dan efisien	

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Isu ketahanan pangan	• Harga komoditas fluktuatif, cenderung turun, nelayan/pembudidaya ikan merugi • Masih rendahnya minat pelau usaha budidaya untuk sertifikasi unit usahanya bagi keperluan <i>food safety</i> dan jaminan mutu • Sempitnya lahan perairan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha perikanan budidaya • Angka kemiskinan masih relatif tinggi, terutama di kalangan nelayan di wilayah pesisir	• Tingginya harga pakan yang berimbas terhadap tingginya ongkos produksi budidaya • Inovasi teknologi pada usaha perikanan • Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu dan pakan murah berkualitas • Belum optimalnya sarana dan prasarana penangkapan ikan • Terbatasnya sarana prasarana produksi • Belum optimalnya peran dan fungsi Sentra-sentra perikanan • Konflik kepentingan antar pengguna misalnya nelayan yang masih marak terkait pemanfaatan pengelolaan ruang laut	
4	Persaingan pasar global dan industrialisasi	• Rendahnya daya saing produk perikanan kelautan • Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah	• Keterbatasan infrastruktur dasar • Terbatasnya akses permodalan • Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien	

Melalui penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan, maka dilakukan penentuan isu-isu strategis, yakni:

1. Kualitas SDM kelautan dan perikanan baik aparaturnya maupun pelaku usaha;
2. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
3. Pengawasan dan penegakan hukum.

2.7 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka mencapai sasaran, pada tahun anggaran 2026 ditetapkan beberapa usulan program dan kegiatan yang terangkum dalam anggaran APBN dan APBD, sebagai berikut:

A. Program APBN Tahun 2026

Pada APBN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 6 program besar sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP dengan kegiatan : (1) Pengelolaan Keuangan KKP, (2) Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP, (3) Pengelolaan Data Statistik dan Informasi
2. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dengan kegiatan : (1) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, (2) Pengendalian Penangkapan Ikan, (3) Pengelolaan Kenelayan, (4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI), (5) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.
3. Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dengan kegiatan: (1) Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, (2)

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan, (3) Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan, (4) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya, (5) Pengelolaan Pakan Ikan.

4. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan kegiatan : (1) Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan, (2) Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan, (3) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, (4) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan, (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen DJPDSPKP.
5. Program pengelolaan kelautan dan ruang laut dengan kegiatan : (1) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, (2) Perencanaan Ruang Laut, (3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen PRL.
6. Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan kegiatan : (1) Operasional Kapal Pengawas, (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, (3) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP.

Program prioritas KKP meliputi lima kebijakan ekonomi biru yang mencakup:

- a) Penambahan luas kawasan konservasi laut dengan Meningkatkan perlindungan habitat penting untuk pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap CO₂ dan memproduksi O₂;
- b) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dengan Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan
- c) Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan dengan Mengurangi tekanan sumber daya ikan di laut, memenuhi kebutuhan protein masyarakat dan pasar ekspor berbasis komoditas unggulan;
- d) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Mengurangi tekanan/ dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dan
- e) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan dengan Menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat

Menu dan rincian Kegiatan DAK Provinsi 2026 yang akan diusulkan meliputi:

- 1) Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi), berupa: (1) Penahan Gelombang (*breakwater*) (2) Turap Penahan Tanah (*revetment*) (3) Dermaga (4) Kolam Pelabuhan (5) Jalan dan Drainase Kawasan Pelabuhan Perikanan (6) Tempat Pemasaran Ikan (7) Fasilitas Air (Tawar) Bersih (8) Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo) (9) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (10) Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur serta (11) Rehabilitasi Pabrik Es/*Cold Storage*
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi), berupa (1) Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/ Calon Induk/ Pakan Alami/Tandon/Bak Pendederan (2) Pembangunan Kolam atau Bak

- Pemijahan/Induk/ Calon Induk/ Pakan Alami/Tandon/Bak Pendederan (3) Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan/atau Buang (keluar) (4) Pembangunan Saluran Air Pasok (masuk) dan/atau Buang (keluar) (5) Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi (6) Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk (7) Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan (8) Penyediaan Sumber Air
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi, dan
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2026, terdapat beberapa program yang diusulkan oleh Sulawesi Tengah, yaitu :

- 1) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan(UPTD Provinsi), yang difokuskan pada PPI Mato, Banggai Laut, PPI Lapeu, Kabupaten Morowali dan PPI Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 2) Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) pada HSRT Mambo, BBI Wuasa, BBI Tonusu dan BBAP Tindaki.
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi – Provinsi pada 4 KKPD dan lokasi prioritas pengawasan.

B. Program APBD Tahun 2026

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan susunan Program/ Kegiatan untuk dana yang bersumber dari APBD dimana sebelumnya terdiri dari 6 (enam) program dan 27 kegiatan menjadi sebagai berikut:

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, meliputi (1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2) Administrasi Keuangan (3) Administrasi Umum (4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, meliputi (1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (3) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (3) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; (4) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut; (5) Pencadangan kawasan konservasi; (6) Pelibatan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut; (7) Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan; (8) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; (9) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (10) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut; (11)

Pencadangan kawasan konservasi; (12) Melibatkan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut; (13) Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan.

- 3) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP, meliputi (1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (4) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (5) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (6) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (7) Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (8) Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (9) Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (10) Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; (11) Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (12) Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (13) Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (14) Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (15) Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; (16) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan; (17) Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan; (18) Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (19) Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (20) Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (21) Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; (22) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan.

- 4) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA, meliputi (1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (2) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (3) Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (4) Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (5) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (6) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
- 5) PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, meliputi : (1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil (2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; (3) Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (4) Pemberian sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN, meliputi : (1) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; (4) Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri; (5) Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri; (6) Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan

konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar; (7) Fasilitas penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan; (8) Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan Pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar; (9) Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar (10) Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri; (11) Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri; (12) Fasilitas akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar; (13) Fasilitas penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan; (14) Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar; (15) Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaah Terhadap RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi acuan bagi setiap daerah dalam pengembangan sektor ini adalah: Pengelolaan sumberdaya ekonomi

1. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; (2) meningkatkan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; (5) meningkatkan SDM, riset kemaritiman dan kelautan serta perbaikan sistem database kelautan dan perikanan; (6) menyusun pedoman penyelerasan RZWP3K dan RTRW Provinsi.

Pengelolaan perikanan akan difokuskan pada penguatan manajemen di 11 WPP, dan pengembangan sentra-sentra produksi perikanan yang berdaya saing. Pengembangan komoditas utama perikanan dan kelautan mencakup komoditas udang, tuna, rumput laut, rajungan dan ikan nila serta garam akan dilakukan di provinsi-provinsi yang memiliki keunggulan kompetitif wilayah di Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, Maluku dan Papua.

2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (3) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital; (4) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi; (5) meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (6) meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN; (7) meningkatkan industri halal dan produk sehat.

3.1.2 Sinergitas RPJMN, RKP 2024 , Renstra KKP RI dalam mendukung Program Nasional

Tujuh agenda pembangunan RPJMN adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (3) Meningkatkan Sumber Daya

Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran Pembangunan RPJMN 2020-2024: Pembangunan yang Berkualitas yaitu dengan Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi dimana kesemuanya itu diukur melalui tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia serta penurunan gas emisi rumah kaca (GRK) menuju target 29% ditahun 2030 (*Paris Agreement*).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024

- 1) Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
- 2) Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
- 3) Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan

- 4) Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- 5) Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan

Dukungan Pemerintah Daerah yang diharapkan terhadap Sektor Kelautan dan Perikanan

- 1) Penyelesaian Sinkronisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dengan Dokumen RTRWP;
- 2) Pembinaan dan pendampingan UMKM Sektor Kelautan & Perikanan untuk peningkatan skala usaha;
- 3) Penguatan Kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat melalui peningkatan dan perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dalam rangka penanganan *Stunting*;
- 4) Dukungan penyediaan lahan yang *clear* dan *clean* dalam mendukung kegiatan prioritas KKP (pelabuhan perikanan, *cold storage*, pasar dll);
- 5) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mendukung masuknya investasi sektor kelautan dan perikanan;
- 6) Fasilitasi pelaku utama KP dalam rangka pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
- 7) Penjabaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) terkait kelautan dan perikanan dalam RPJMD untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
- 8) Penguatan sistem data statistik kelautan dan perikanan di daerah dengan satu data KKP.

Arah dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan didalam mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Bila merunut arah dan kebijakan nasional diatas, fokus pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah pemasar perikanan dan masyarakat pesisir lainnya
2. Peningkatan produksi perikanan, konsumsi ikan per kapita serta ekspor hasil perikanan
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan
4. Pengembangan teknologi informasi dan IPTEK untuk mendukung pengembangan usaha sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah
5. Peningkatan mutu produk hasil perikanan dan pengurangan losses
6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan POKMASWAS; pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya termasuk TNI-AL, Bea cukai, Perhubungan, Perdagangan, dll; sosialisasi aturan dan pentingnya pengawasan; fasilitasi pengembangan PERDES
7. Penguatan Legislasi dan Regulasi
8. Penerapan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Pengelolaan Lingkungan

9. Mitigasi bencana, pencemaran dan dampak perubahan iklim.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja adalah untuk memfokuskan arah perencanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan lainnya agar terjadi sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. Sesuai IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah dapat dilihat pada tabel dibawah;

Tabel 16. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2025
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan	101,05
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	101,03
	Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	40,65
Terwujudnya Pengelolaan Kawasan SDKP yang Berkelanjutan	Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap Total Kawasan Perairan Teritorial	0,1803
Terselenggaranya Pengawasan SDKP Berdasarkan Regulasi yang Berlaku	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	82

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diarahkan sesuai dengan Kebijakan Pusat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 serta RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah 2021–2026, dimana terdapat beberapa program yang diharapkan dapat menjadi unggulan Sulawesi Tengah di tahun-tahun mendatang. Pengembangan komoditas kelautan dan perikanan terbagi atas (A) Komoditas Industrialisasi: (1) Rumput Laut : (a) *Euchema cottonii*, (b) *Gracillaria sp*, (2) Tuna Tongkol Cakalang, (3) Udang, (4) Ikan Demersal, (5) Sidat dan (B) Komoditas Ketahanan Pangan antara lain (1) Lele, (2) Nila, (3) Mas, (4) Pelagis Kecil.

Berikut Rencana Pengembangan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tengah:

A. Pengembangan Rumput Laut

Potensi areal budidaya rumput laut sebesar 540.012 Ha, sedang lahan tambak sebesar 42.095 Ha. Dominasi produksi yang cukup besar terdapat pada pengembangan komoditi rumput laut, yaitu *Euchema Cottoni* yang banyak diusahakan pada budidaya laut dan *Glacillaria sp* yang diusahakan pada budidaya tambak.

Guna mendukung pengembangan rumput laut di Sulawesi Tengah, pada tahun 2019, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kerjasama dengan SEOMEIO BIOTROP dalam melakukan pengembangan Rumput Laut Teknologi Kultur Jaringan di Sulawesi Tengah dimana permasalahan rumput laut

di Sulawesi Tengah yaitu (1) Tingginya fluktuasi harga sehingga belum menjadi usaha pokok; (2) Rendahnya produktifitas dan mutu rumput laut, karena masih menggantungkan bibit yang diperoleh secara vegetatif dari kawasan budidaya sekitarnya; (3) Jumlah kebun bibit yang terbatas; (4) Belum diproduksi dengan cara modern melalui kebun bibit yang asal induknya hasil kultur jaringan; (5) Penyediaan bibit dipengaruhi musim; dan (6) Perbanyak bibit secara vegetatif terus menerus menyebabkan pertumbuhan lambat, mudah terkena penyakit serta kandungan karaginan rendah. Metode ini dipilih karena dapat memproduksi bibit rumput laut dalam skala besar. Tidak dipengaruhi musim karena dilakukan di laboratorium, bibit yang dihasilkan memiliki sifat yang identik dengan induknya, tidak memerlukan tempat yang luas dan kesehatan dan mutu bibit yang dihasilkan lebih terjamin.

B. Pengembangan Tuna, Tongkol, Cakalang dan Pelagis Kecil

Industrialisasi Tuna, Tongkol, Cakalang dan Pelagis Kecil Dilakukan dalam mendukung peningkatan devisa dan ketahanan pangan nasional, dilakukan melalui perkuatan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Produksi Tuna, Tongkol dan Cakalang tahun 2021 sebesar 45.892,75 ton; sedangkan pelagis kecil = 66.904,75 ton. Strategis Industrialiasasi sebagai berikut: (1) peningkatan SDM pelaku usaha penguasaan IPTEK; (2) penataan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pangkalan pendaratan ikan (PPI); (3) rencana pengembangan karamba tuna; (4) pengembangan kawasan minapolitan tangkap pada PPI Donggala; PPI Pagimana dan Outer Ring Fishing Port Ogotua; (5) pemberdayaan nelayan skala 3-10 GT untuk Tuna/Cakalang; (6) restrukturisasi armada secara bertahap hingga 15-20 GT dan >30 GT; (7) pengembangan industri pengolahan (*processing and canning*) berbasis *zero waste*; (8) pengembangan industri penunjang (kapal fiberglass; dan alat tangkap ikan).

C. Pengembangan Udang

Potensi lahan tambak berkisar 54.812 Ha; namun pemanfaatannya baru sekitar 28,32%. Produksi udang tahun 2021 sebanyak 50.485,02 ton, didominasi Udang Windu (P. Monodon) dari tambak rakyat. Kawasan pertambakan di Sulawesi Tengah mempunyai ciri khas: (a) tidak berada dalam satu kawasan luas; namun berkisar 100-200 Ha; (b) jarak antar kawasan relatif jauh, berkisar 3-5 km; (c) sumberdaya air yang masih alami. Kondisi ini sangat ideal untuk pertambakan supra intensif; mengingat kecilnya potensi penyebaran penyakit secara horisontal. Strategis Industrialiasasi sebagai berikut: (1) peningkatan SDM dan penguasaan IPTEK pelaku usaha; (2) pengembangan coldstorage, hatchery dan pabrik pakan; (3) pengembangan tambak rakyat dengan komoditas Udang Windu, serta polikultur dengan bandeng dan *Gracilaria sp* melalui: (a) penguatan BBU dan produksi benih unggul; (b) revitalisasi konstruksi dan saluran tambak, (c) stimulan permodalan kerja, (d) pendampingan teknis budidaya; dan (4) Pengembangan Tambak Supra Intensif dengan komoditas Udang Vaname (L. Vannamei) melalui: (a) penggunaa teknologi yang efisien ramah lingkungan dan (b) tax holiday bagi pengembangan investasi.

D. Pengembangan Ikan Demersal

Produksi Ikan Demersal didominasi oleh *Red Snapper*, *Baramundi*, *Grouper*, *Giant Seaperch*, *Yellowtail Fusilier*, *Black and Silver Pomfret* dan *Goat-Fist*. Produksi tahun 2021 sebesar 52.312,30 ton. Pasar Ikan Dermesal, terutama Kerapu Hidup adalah Jepang, Singapura, Hongkong, Cina dan Taiwan sedangkan bentuk frozen dikirim ke Eropa dan Amerika. Pabrik-pabrik Pengolahan (*Processing Plant*) berorientasi ekspor umumnya berada di daerah kabupaten Banggai. Pengembangan Ikan Demersal akan diintegrasikan dengan *Sea Ranching* berbasis Rumah Ikan (*Fish Home*). *Fish Home* adalah terumbu karang buatan (*artificial reef*), berfungsi sebagai: (a) alat pengumpul; (b) tempat reproduksi ikan, serta (c) rehabilitasi ekosistem laut. Tujuan pembangunan *Fish Home* sebagai upaya konservasi, produksi; dan secara tidak langsung menjaga ketersediaan *food chain* bagi Tuna dan pelagis besar. *Sea Ranching* merupakan kegiatan terintegrasi antara bidang perikanan tangkap, budidaya, kelautan dan pengawasan. Strategi Industrialisasi sebagai berikut: (1) Peningkatan SDM untuk penguasaan IPTEK, (2) Penyiapan ekosistem berupa pembangunan *Fish Home*, (3) penyiapan kelembagaan masyarakat; (4) restocking ikan ekonomis penting non ruaya pada kawasan *Fish Home*; (5) penyiapan aturan main pengolahan kawasan dan (6) peningkatan peran swasta khususnya eksportir ikan demersal dalam tata kelola *Fish Home*.

E. Pengembangan Ikan Air Tawar

Pengembangan ikan air tawar lebih diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan konsumsi akan. Produksi tahun 2022 sebesar 1.918,249 ton. Strategi Industrialisasi sebagai berikut: (1) Pengembangan BBI dan Sentral Budidaya Ikan Air Tawar pada kolam, tambak marginal, Perairan Umum Daratan serta disekitar kawasan perkebunan dan pertambangan, fokus pada ikan mas, dan nila; (2) kerjasama pengembangan Budidaya Ikan Hemat Air di pekarangan rumah antara lain dengan penggunaan bioflok; melibatkan ORMAS, antara lain Organisasi Wanita, Pemuda dan Persatuan Wredatama, fokus pada ikan lele, nila, dan mas; (3) Kampanye GEMARIKAN dan diversifikasi produk perikanan.

3.4 Pendanaan Program dan Kegiatan 2025 dan RKPD Perubahan 2025

Tabel 17. Pendanaan Program dan Kegiatan 2025 dan RKPD 2025

Program / Kegiatan	Pagu APBD (Rp)	RKPD Perubahan (Rp)
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.940.812.558	26.935.668.584
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	686.300.000	325.156.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.539.223.605	23.961.152.464
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.585.000	55.377.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	923.294.187	332.795.669
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.690.995.956	1.612.768.796
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	966.413.810	648.418.155
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	6.140.838.575	1.701.237.915
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	5.685.247.675	1.373.653.915
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	219.535.000	91.528.100
Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	236.055.900	236.055.900
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	33.984.963.700	10.375.388.700
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	7.812.839.700	9.583.554.700
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	172.124.000	91.834.000
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	-	-
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	26.000.000.000	700.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12.540.594.642	3.318.968.715
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sd 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-	-
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.612.740.500	1.344.878.525
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	10.927.854.142	1.974.090.190
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.558.726.685	1.257.384.859
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Prov	147.696.000	74.729.500
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	829.180.000	641.158.467
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	581.850.685	541.496.893
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.428.041.362	2.789.959.549
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	7.312.259.362	2.713.133.549
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	115.782.000	76.826.000
UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN	2.070.000.000	2.393.062.352
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.330.854.000	1.389.742.352
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.800.000	76.800.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.953.880	19.301.940
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.104.580.120	1.188.460.412
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.520.000	105.180.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	739.146.000	1.003.320.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	739.146.000	1.003.320.000
UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)	899.993.136	716.725.209
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	615.186.324	545.552.084
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.100.000	53.100.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.723.590	4.909.350
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.823.034	427.287.034
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.539.700	60.255.700
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	284.806.812	171.173.125
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	284.806.812	171.173.125
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I	1.440.000.000	1.410.935.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.209.717.400	1.218.709.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.128.600	79.873.350
Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.273.500	18.110.650
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.030.305.300	1.065.705.300
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.010.000	55.020.000
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	51.805.400	28.285.700

Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	51.805.400	28.285.700
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	178.477.200	163.940.600
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	178.477.200	163.940.600
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II	1.440.000.000	1.311.072.672
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.213.347.850	1.194.077.972
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.810.000	73.810.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.848.650	31.938.150
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814.011.832	861.416.832
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.677.368	226.912.990
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	108.075.750	92.622.300
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	108.075.750	92.622.300
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	118.576.400	24.372.400
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	118.576.400	24.372.400
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III	1.170.000.284	1.072.587.845
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.015.355.484	942.160.645
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.640.000	68.640.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.806.678	26.284.339
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.604.256	752.593.756
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.304.550	94.642.550
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	37.656.800	25.102.600
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	37.656.800	25.102.600
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	116.988.000	105.324.600
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	116.988.000	105.324.600
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV	845.293.735	1.924.278.341
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	520.531.335	506.997.935
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.610.000	75.415.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.563.975	37.321.575
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.695.360	337.095.360
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.662.000	57.166.000
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	73.629.500	49.814.750
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	73.629.500	49.814.750
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	251.132.900	1.367.465.656
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	251.132.900	1.367.465.656
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH V	1.125.000.000	1.104.677.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.086.300.000	1.084.367.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82.760.000	73.660.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.800.000	25.957.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899.290.000	916.990.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.450.000	67.760.000
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	20.760.000	11.340.000
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	20.760.000	11.340.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	17.940.000	8.970.000
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	17.940.000	8.970.000
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH VI	90.550.000	941.736.425
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	90.550.000	783.870.125
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.550.000	85.130.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.001.390	132.129.765
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.424.610	531.388.360
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.640.000	35.222.000
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	135.948.000	86.181.300
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	135.948.000	86.181.300
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	88.436.000	71.685.000
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	88.436.000	71.685.000
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH VII	450.000.000	357.164.480
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	250.000.000	196.290.480
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.000.000	48.226.765
Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.200.000	9.181.525
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.800.000	91.692.190
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000	47.190.000
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	100.000.000	96.750.000
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100.000.000	96.750.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	100.000.000	64.124.000
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	100.000.000	64.124.000

3.5 FOKUS UTAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, terdapat perubahan struktur UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dimana awalnya berjumlah 10 UPTD menjadi 9 (sembilan) UPTD, sebagai berikut :

1. UPTD Balai Perbenihan Perikanan Kelas A;
2. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
3. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I Kelas A;
4. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II Kelas A;
5. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III Kelas A;
6. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV Kelas A;
7. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V Kelas A;
8. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI Kelas A; dan
9. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII Kelas A

3.5.1 Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pengelolaan administrasi program, keuangan, asset, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas dengan fungsi : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja. pengelolaan administrasi keuangan. asset. kepegawaian dan umum; (b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja. pengelolaan administrasi keuangan. asset. kepegawaian dan umum; (c) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan. asset. kepegawaian. rumah tangga dan umum; (d) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan. asset. kepegawaian. rumah tangga dan umum; (e) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan. asset. kepegawaian. rumah tangga dan umum; (f) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan (g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Fokus pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat pada tahun anggaran 2025 adalah diarahkan pada Peningkatan SDM Teknis, Sosialisasi Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur turunan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan, Penataan lingkungan kantor, Penyiapan Renstra 2025-2029 dan dokumen perencanaan lainnya, Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Program/Kegiatan, pelaporan keuangan

berbasis akrual dan sinkronisasi asset, dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan administrasi keuangan, penataan kepegawaian dan perkantoran lainnya.

3.5.2 Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan fungsi : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; dan (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perikanan tangkap pada tahun anggaran 2025 difokuskan pada : (a) Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap termasuk dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin, mengatasi rawan pangan melalui inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (TETRA PANDU) dan peningkatan produktifitas perikanan tangkap antara lain melalui Program *Smart Fishing* dan bantuan sarana prasarana bagi kelompok nelayan; (b) koordinasi dengan stakeholder terkait permasalahan perikanan tangkap (antara lain : ketersediaan BBM, kondisi cuaca, perijinan); (c) pelayanan kepelabuhanan; (d) Peningkatan kapasitas nelayan; (e) dukungan (e) dukungan administrasi pelaksanaan program kegiatan perikanan tangkap.

3.5.3 Perikanan Budidaya dan P2HP

Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP bertugas membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan fungsi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan

fungsi: (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pengembangan Usaha Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan (h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP.

Fokus kegiatan bidang perikanan budidaya dan P2HP tahun 2024 adalah (1) pengelolaan dan pemuktahiran basis data kegiatan pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, termasuk didalamnya kegiatan perijinan; (2) Pengembangan Rumput Laut Kultur Jaringan dalam rangka peningkatan produksi dan kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan; (3) Pengembangan budidaya ikan air tawar melalui inovasi-inovasi, antara lain melalui penerapan bioflok dan biotren (bioflok masuk pesantren) yang juga dilakukan dalam rangka pengendalian Schistosomiasis di Kabupaten Poso dan Sigi; (4) Program Bantuan Sarana Produksi Perikanan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas; (5) Dukungan Peningkatan Infrastruktur UPT Perbenihan; (6) Peningkatan Pemantauan dan Pengendalian Hama dan Kesehatan Ikan; (7) Peningkatan Kapasitas Pokdakan Budidaya melalui CBIB dan CPIB; (8) Dukungan Keamanan Pangan Hasil Perikanan; (9) Penguatan Kelembagaan Poklhasr sera Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan melalui bantuan sosial dan rehab ruang pengolahan PMHP; (10) Penyediaan sarana CCS Pendukung Produksi, antara lain dengan Penyediaan ice storage pada PPI Paranggi dan PPI Mato; (11) Peningkatan Fasilitas SKP dan Ekspor Hasil Perikanan; (13) Kampanye Gemarikan dalam rangka penurunan stunting dan (14) Dukungan bagi Program Pengentasan Stunting dan Penurunan Daerah Rawan Pangan.

3.5.4 Pengelolaan Ruang Laut

Tugas bidang pengelolaan ruang laut adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; dengan fungsi: (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang laut dan Konservasi Ruang Laut; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan (h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Ruang Laut.

Rencana fokus kegiatan tahun 2025 adalah (a) Sosialisasi Perda terkait Bidang Kelautan; (b) Inventarisasi Data Existing Pemanfaatan RL; (c) Kegiatan Pengelolaan RL sampai dengan 12 Mil; (d) Rehab Terumbu Karang dan Penanaman mangrove; (e) Pengadaan sarana prasarana penanganan sampah laut (f) Pemetaan Sebaran Ekosistem Terumbu Karang dan Mangrove; (g) Fasilitasi Perijinan termasuk verifikasi lapangan terkait Perijinan; (h) Survey Kondisi Existing Pemanfaatan RL; (i) Sosialisasi Sistem Kadaster Laut dalam Pemanfaatan RL; (j) Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir serta pelibatan dan penguatan kelembagaan diantaranya melalui Pelatihan terkait Bulan Cinta Laut bagi Masyarakat Pesisir; (k) Penanganan Pencemaran di wilayah kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; (l) Monitoring biofisik dan sosek kawasan konservasi; dan (m) Pemberdayaan dan Fasilitasi kelembagaan kelompok masyarakat pesisir.

3.5.5 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tugas bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis. dan monitoring. evaluasi dan pelaporan terhadap menyelenggarakan fungsi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran dengan fungsi : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang

Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP dan Penanganan Pelanggaran dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan (h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Rencana fokus kegiatan tahun 2025 bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah (a) pelaksanaan gelar operasi; (b) pembinaan kelompok masyarakat pengawas; (c) rehabilitasi sarana prasarana pengawasan; (d) pengadaan vessel monitoring system serta (e) peningkatan SDM Pengawas.

3.5.6 UPTD Balai Perbenihan Perikanan

UPT Perbenihan Perikanan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas. di bidang Perbenihan Perikanan dengan fungsi : (a) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Perbenihan Perikanan; (b) Melaksanakan pelayanan dan pengkajian teknologi dibidang Perbenihan dan Budidaya Perikanan; (c) Melaksanakan tugas teknis operasional/penunjang dinas di bidang Perbenihan perikanan; (d) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana Perbenihan perikanan; dan (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fokus kegiatan UPT Perbenihan Perikanan tahun 2025 adalah (1) perikanan tawar fokus pada komoditas ketahanan pangan: (a) Mas (b) Nila dan (c) Lele dengan cara perbaikan mutu induk dan benih antara lain melalui perbanyak induk ikan air tawar, teknologi produksi massal benih di BBIS Tulo, Kalawara, Tonusu, Wuasa, Palolo dan penerapan teknologi budidaya di unit perbenihan; (2) perikanan payau pada komoditas udang vanname dengan: peningkatan kualitas benih dan produksi udang vaname pada Instalasi Mambo, BBIP Kampal dan Tambak Tindaki serta peningkatan kapasitas SDM Teknis; serta (3) pengembangan inovasi-inovasi.

3.5.7 UPTD PMHP

Mempunyai tugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPT

Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan; (2) Pelaksanaan Tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan; (3) Pelaksanaan Pelayanan Tugas teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan; (4) Melaksanakan Pembangunan. Pengembangan. Pemeliharaan. pendayagunaan dan Pengawasan dan Pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan; (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fokus kegiatan UPTD PMHP tahun 2025 adalah (a) Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai standar; (b) Pembinaan penerapan GMP dan SSOP bagi “Poklhasar”; (c) Monitoring penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan; (d) Penerapan mutu dan bimtek yang memenuhi SNI; (e) inovasi pengolahan produk hasil perikanan; dan (f) peningkatan kapasitas SDM Aparatur.

3.5.8 UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I - VII

- 1) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I; dengan wilayah kerja meliputi PPI Donggala dan Kawasan Konservasi Kabupaten Donggala;
- 2) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II; dengan wilayah kerja meliputi PPI Paranggi dan Kawasan Konservasi Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-una;
- 3) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III; dengan wilayah kerja meliputi PPI Pagimana dan Kawasan Konservasi Kabupaten Banggai;
- 4) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV; dengan wilayah kerja meliputi PPI Kolonedale dan Kawasan Konservasi Kabupaten Morowali Utara;
- 5) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V; dengan wilayah kerja meliputi PPP Ogotua dan Kawasan Konservasi Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol;
- 6) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI; dengan wilayah kerja meliputi PPI Mato dan Kawasan Konservasi Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut
- 7) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII; dengan wilayah kerja meliputi PPI Lafeu dan Kawasan Konservasi Kabupaten Morowali;

Fokus kegiatan tahun 2025 UPT Wilayah adalah:

- Peningkatan SDM Aparatur
- Peningkatan pelayanan kepelabuhanan

- Dukungan operasional dan administrasi pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi
- Pemeliharaan sarana dan prasarana serta infrastruktur Pelabuhan Perikanan Donggala, Ogotua, Paranggi, Kolonedale, Pagimana, Salakan dan Mato
- Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi
- Pengembangan inovasi

BAB IV PENUTUP

Pembangunan Kelautan dan Perikanan belakangan ini mendapat perhatian yang cukup besar baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan antara lain: (1) terbatasnya BBM bersubsidi, pupuk, pakan dan benih berkualitas (2) kelistrikan; (3) moda transportasi; (4) prasarana jalan; (5) lemahnya SDM perikanan; (6) terbatasnya sarana produksi perikanan; (7) penurunan kualitas lingkungan; (8) masih terbatasnya anggaran yang mendukung sektor kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun dengan stakeholder terkait dimana sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas.

Akhirnya, keberhasilan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan tidak terlepas dari sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin penyelenggara/aparat serta peran aktif masyarakat untuk saling bekerjasama dalam mensukseskan tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan/program untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Demikian pula indikator dan target kinerja dapat dipahami secara utuh yang pada akhirnya segenap kemampuan yang ada dapat diarahkan untuk peningkatan secara keseluruhan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)		
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t- n)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			2023	2020	2020	2020	2020	2021	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan Administarsi yang tepat waktu %	100	100	100	100	1	100	100	100	1
		Program Peningkatan Sarpras Kerja Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah %	100	100	100	100	1	100	100	100	1
		Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur	Persentase Peningkatan kompetensi aparatur (%)	100	100	100	100	1	100	100	100	1
		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan Capaian Kinerja tepat waktu (%)	100	100	100	100	1	100	100	100	1
		Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur	Persentase Peningkatan kompetensi aparatur (%)	100	100	100	100	1	100	100	100	1
		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan Capaian Kinerja tepat waktu (%)	100	100	100	100	1	100	100	100	1
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi SKPD (%)	100	100	100	100	1	100	100	100	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reasalisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t- n)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2023	2020	2020	2020	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
	Program Pengembangan SDM KP	Lulusan STPL palu (Orang)	30	20	30	36	1,2	30	25	25	0,83
		Meningkatnya Jumlah Siswa pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan (orang)			30	30	1	30	37	37	
	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan tangkap (ton)	251.686,04	171.115	228.286,66	196.519,30	0,86	239700	201.101,80	201.101,80	0,80
		Nilai Tukar Perikanan Tangkap (%)	108,76	114,56	107,68	112,98	1,05	108,22	98,11	98,11	0,90
		Jumlah Sentra KP yang ditingkatkan Infrastrukturnya	2	3	2	2	1,00	2	3	3	1,50
	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan budidaya (ton)	1.554.843	918.186,64	1.009.800	966.953,01	0,96	1.110.780	588.746,45	588.746,45	0,38
		Nilai Tukar Pembudidaya	97,82	85,83	85	87,11	1,02	86	100,01	100,01	1,02
		Jumlah Sentra KP yang ditingkatkan Infrastrukturnya	2	2,00	2	2,00	1,00	0	-	-	#VALUE!
	Program Penguatan daya saing produk perikanan	Nilai Eksport Hasil Perikanan (US\$)	3.784.000	3.630.475,19	3.200.000	3.763.124,02	1,18	3.520.000	3.763.124	3.763.124,02	0,99
		- Konsumsi Ikan	53,83	56,65	50,14	57,54	1,15	51,95	57,54	57,54	1,07
		Nilai Pembiayaan Usaha Hasil KP dan Lembaga Keangan Bank dan Bukan Bank (Rp. 1000)	120.000	143.918.843,11	100.000	1.462.459,46	14,62	110.000	613.691	613.691,06	5,11
	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan & Perikanan	- Persentase Kepatuhan (Compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan Peraturan perundang- undangan yang berlaku	65	59,71	55	59,71	1,09	60	85,71	85,71	1,32
		- Presentase Penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang- undangan	75	100	65	100	1,54	70	100	100	1,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t- n)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2023	2020	2020	2020	2020	2021	2021	11 = 5+7+10	12 = 11/4
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
	Program Pengelolaan Ruang Laut	- Jumlah Luasan Kawasan Konservasi (ha)	1.200.000	1.379.159,79	1.000.000	1.338.291,55	1,3	1.100.000	1.338.292	1.338.292	1,12

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2022 dan Prakiraan 2025-2026

[illegible]

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Periode/ Tahun : 2025

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu APBD (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	RKPD Perubahan (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Palu	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	68.00	28,940,812,558	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Palu	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	68.00	26,935,668,584	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (dokumen)	3.00	686,300,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (dokumen)	3.00	325,156,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2.00	524,278,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2.00	174,764,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dok)	1.00	162,022,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dok)	1.00	150,392,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	24,539,223,605	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	23,961,152,464	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	1	23,895,993,815	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	1	23,396,378,589	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	386,520,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	450,000,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan)	1.00	78,320,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan)	1.00	3,900,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1.00	88,072,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1.00	49,033,750	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	1.00	90,317,790	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	1.00	61,840,125	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palu	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1.00	134,585,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palu	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1.00	55,377,500	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (org)	3.00	134,585,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (org)	3.00	55,377,500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	923,294,187	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	332,795,669	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	647,870,862	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	220,755,999	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1.00	153,085,725	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1.00	51,039,670	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1.00	122,337,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1.00	61,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	1,690,995,956	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	1,612,768,796	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	784,495,956	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	788,343,796	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	906,500,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	824,425,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	966,413,810	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	648,418,155	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48.00	463,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48.00	274,850,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	48.00	204,181,310	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	48.00	180,935,655	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5.00	298,632,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5.00	192,632,500	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	11 kab/1 kota	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	6,140,838,575	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	11 kab/1 kota	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	1,701,237,915	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11 kab/ 1 kota	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	5,685,247,675	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11 kab/ 1 kota	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	1,373,653,915	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	4 KKP	Luas kawasan konservasi perairan yang dicadangkan (Ha)	668,757	4,132,044,100	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	4 KKP	Luas kawasan konservasi perairan yang dicadangkan (Ha)	668,757	132,430,000	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	4,019	1,553,203,575	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	4,019	1,241,223,915	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11 kab/ 1 kota	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi (%)	100	219,535,000	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11 kab/ 1 kota	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi (%)	100	91,528,100	
	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	11 kab/ 1 kota	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut (Dokumen)	1.00	219,535,000	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	11 kab/ 1 kota	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut (Dokumen)	1.00	91,528,100	
	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	12 kab/ 1 kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100	236,055,900	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	12 kab/ 1 kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100	236,055,900	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	250.00		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	250.00		
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kelompok)	3.00	97,555,000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kelompok)	3.00	97,555,000	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (orang)	230.00	138,500,900	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (orang)	230.00	138,500,900	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11 kab/ 1 kota	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	2.00		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11 kab/ 1 kota	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	2.00		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	253,705.54	33,984,963,700	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	253,705.54	10,375,388,700	
		12 kab/ 1 kota	Nilai Tukar Nelayan	104.00			12 kab/ 1 kota	Nilai Tukar Nelayan	100.00		diusulkan perubahan mengikuti kondisi lapang
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	11 kab/ 1 kota	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	< 50%	7,812,839,700	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	11 kab/ 1 kota	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	< 50%	9,583,554,700	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	11 kab/ 1 kota	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	12	625,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	11 kab/ 1 kota	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	12	472,640,000	
	Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	11 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	240.00	7,187,839,700	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	11 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	240.00	9,110,914,700	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu APBD (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	RKPD Perubahan (Rp)	Catatan Penting
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	5 kabupaten	Produksi Perikanan PUD (ton)	3,017.48	172,124,000	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	5 kabupaten	Produksi Perikanan PUD (ton)	3,017.48	91,834,000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5 kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	5	172,124,000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5 kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	5	91,834,000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5 kabupaten	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)								
	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT</i>	11 kab/ 1 kota	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)	100.00	-	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT</i>	11 kab/ 1 kota	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)	100.00	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	11 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (dokumen)	1.00		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	11 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (dokumen)	1.00		
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	11 Kab	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)	8.00	26,000,000,000	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	11 Kab	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)	8.00	700,000,000	
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	11 kab/ 1 kota	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan)	1.00					1.00		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	11 Kab	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	2.00	26,000,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	11 Kab	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	2.00	700,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1,316,226.79	12,540,594,642	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	870,000.00	3,318,968,715	
		12 kab/ 1 kota	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	101.51			12 kab/ 1 kota	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	97.20		
	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi (%)</i>	100.00	-	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi (%)</i>	100.00	-	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1		
	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi (%)	100.00	-	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi (%)	50.00	-	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1		
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	12	1,612,740,500	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	1.00	1,344,878,525	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			diusulkan perubahan menyesuaikan perubahan anggaran dan kesesuaian keadaan lapang
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	13 Kab	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	5.00	576,475,850	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	13 Kab	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	3.00	308,613,875	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	101.00	1,036,264,650	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	97.00	1,036,264,650	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	1.00		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	1.00		
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	13	10,927,854,142	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	1.00	1,974,090,190	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (unit)	9.00	8,499,635,900	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (unit)	5.00	71,152,750	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (unit)	132.00	2,428,218,242	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (unit)	132.00	1,902,937,440	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Olahan (Kg)	7,205,885.00	1,558,726,685	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Olahan (Kg)	7,205,885.00	1,257,384,859	
	<i>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (%)	100.00	147,696,000	<i>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (%)	100.00	74,729,500	
	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar (rekomendasi)	1	60,000,000	Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi (Rekomendasi)	1	45,335,500	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1.00	87,696,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1.00	29,394,000	
	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	120.00	829,180,000	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	120.00	641,158,467	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (kegiatan)	25.00	829,180,000	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (kegiatan)	25.00	641,158,467	
	<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi (%)	70.00	581,850,685	<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi (%)	70.00	541,496,893	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)	1.00	172,079,125	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)	1.00	136,448,813	
	Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas (unit usaha)	7.00	409,771,560	Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas (unit usaha)	7.00	405,048,080	
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Dokumen)	1.00		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Dokumen)	1.00		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administrasi & Sanksi Pidana (%)	50.00	7,428,041,362	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administrasi & Sanksi Pidana (%)	50.00	2,789,959,549	
	<i>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pengawas Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompetensi mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (orang)	35.00	7,312,259,362	<i>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pengawas Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompetensi mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (orang)	35.00	2,713,133,549	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu APBD (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	RKPD Perubahan (Rp)	Catatan Penting
	<i>Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani (perkara)	2.00	3,542,495,000	<i>Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani (perkara)	2.00	296,512,499	
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	25.00	241,601,000	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	25.00	202,068,500	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	350.00	394,986,900	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	350.00	958,612,550	
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	30.00	262,780,000	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	30.00	221,140,000	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	11 kab/ 1 kota	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (kelompok masyarakat)	55	2,870,396,000	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	11 kab/ 1 kota	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (kelompok masyarakat)	55	1,034,800,000	
	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	11 kab/ 1 kota	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya) yang terbina (kelompok)	6	115,782,000	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	11 kab/ 1 kota	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya) yang terbina (kelompok)	6	76,826,000	
	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	6	115,782,000	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	6	76,826,000	
	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				2,070,000,000	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				2,393,062,352	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	1,330,854,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	1,389,742,352	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	76,800,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	76,800,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	76,800,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	76,800,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	29,953,880	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	19,301,940	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	29,953,880	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	19,301,940	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	1,104,580,120	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	1,188,460,412	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	565,280,120	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	572,010,412	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	539,300,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	616,450,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	119,520,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	105,180,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	119,520,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	105,180,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	UPTD Perbenihan	Jumlah produksi benih ikan dan udang bermutu (juta benih)	4.90	739,146,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	UPTD Perbenihan	Jumlah produksi benih ikan dan udang bermutu (juta benih)	4.90	1,003,320,000	
		UPTD Perbenihan	Target PAD (Rp1000)	2,093,000.00			UPTD Perbenihan	Target PAD (Rp1000)	2,093,000.00		
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	UPTD Perbenihan	Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)	35,400.00	739,146,000	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	UPTD Perbenihan	Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)	35,400.00	1,003,320,000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	7.00	501,380,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	7.00	789,880,000	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	5.00	237,766,000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	5.00	213,440,000	
	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				899,993,136	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				716,725,209	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Palu	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	615,186,324	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Palu	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	545,552,084	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	53,100,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	53,100,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	53,100,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	53,100,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	29,723,590	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	4,909,350	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	29,723,590	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	4,909,350	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	464,823,034	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	427,287,034	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	167,882,034	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	167,882,034	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	296,941,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	259,405,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	67,539,700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	60,255,700	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	67,539,700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	60,255,700	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar Mutu Hasil Perikanan (%)	80.00	284,806,812	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar Mutu Hasil Perikanan (%)	80.00	171,173,125	
	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	11.00	284,806,812	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	11.00	171,173,125	
	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (kegiatan)	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (kegiatan)	6.00	136,453,562	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5.00	59,862,875	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	12 kab/ 1 kota	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko (kegiatan)	3.00	148,353,250	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	12 kab/ 1 kota	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko (kegiatan)	3.00	111,310,250	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				1,440,000,000	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				1,410,935,600	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	1,209,717,400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	1,218,709,300	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	92,128,600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	79,873,350	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	92,128,600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	79,873,350	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu APBD (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	RKPD Perubahan (Rp)	Catatan Penting
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	21,273,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	18,110,650	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	21,273,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	18,110,650	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	1,030,305,300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	1,065,705,300	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	829,905,300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	829,905,300	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	200,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	235,800,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	66,010,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	55,020,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	10.00	66,010,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	10.00	55,020,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	51,805,400	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	28,285,700	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	51,805,400	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	28,285,700	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	942.34	51,805,400	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	942.34	28,285,700	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	PAD Pelabuhan Wilayah I (Rp.1.000)	1,063,274.00	178,477,200	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	PAD Pelabuhan Wilayah I (Rp.1.000)	1,063,274.00	163,940,600	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah I (kg)	990,000.00	178,477,200	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah I (kg)	990,000.00	163,940,600	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah I (balok)	187,458.00	178,477,200	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah I (balok)	187,458.00	163,940,600	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	1.00				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7.00		
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II				1,440,000,000	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II				1,311,072,672	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	1,213,347,850	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	1,194,077,972	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	73,810,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	73,810,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	73,810,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	73,810,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	89,848,650	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	31,938,150	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	89,848,650	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	31,938,150	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1.00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	814,011,832	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	861,416,832	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	555,661,832	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	555,841,832	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	258,350,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	305,575,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	235,677,368	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	226,912,990	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	235,677,368	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	226,912,990	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	108,075,750	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	92,622,300	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	108,075,750	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	92,622,300	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	121,276.46	108,075,750	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	121,276.46	92,622,300	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	PAD Pelabuhan Wilayah II (Rp.1000)	1,089,957.00	118,576,400	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	PAD Pelabuhan Wilayah II (Rp.1000)	1,089,957.00	24,372,400	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu APBD (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	RKPD Perubahan (Rp)	Catatan Penting
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah II (Kg)	1,929,495.00	118,576,400	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah II (Kg)	1,929,495.00	24,372,400	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah II (balok)	4,400.00	118,576,400	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah II (balok)	4,400.00	24,372,400	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	1.00				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	1.00		
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III					1,170,000,284	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III				1,072,587,845	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	1,015,355,484	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	942,160,645	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	68,640,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	68,640,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	68,640,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	68,640,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	46,806,678	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	26,284,339	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	46,806,678	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	26,284,339	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	791,604,256	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	752,593,756	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	492,151,256	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	492,151,256	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	299,453,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	260,442,500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	108,304,550	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	94,642,550	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2.00	108,304,550	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2.00	94,642,550	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	37,656,800	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	25,102,600	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	37,656,800	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	25,102,600	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	117,167.33	37,656,800	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	117,167.33	25,102,600	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	PAD Pelabuhan Wilayah III (Rp.1000)	491,000.00	116,988,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	PAD Pelabuhan Wilayah III (Rp.1000)	491,000.00	105,324,600	
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah III (Kg)	673,655.00	116,988,000	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah III (Kg)	673,655.00	105,324,600	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah III (balok)	13,113.00	116,988,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah III (balok)	13,113.00	105,324,600	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7.00				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7.00		
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV					830,923,335	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV				785,861,741	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	520,531,335	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	506,997,935	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	93,610,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	75,415,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	93,610,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	75,415,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	61,563,975	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	37,321,575	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	61,563,975	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	37,321,575	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	301,695,360	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	337,095,360	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	211,695,360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	211,695,360	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	90,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	125,400,000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu APBD (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	RKPD Perubahan (Rp)	Catatan Penting
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	63,662,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	57,166,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	63,662,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	57,166,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	73,629,500	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	49,814,750	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	73,629,500	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	49,814,750	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	40,783.08	73,629,500	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	40,783.08	49,814,750	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	PAD Pelabuhan Wilayah IV (Rp.1000)	226,720.00	236,762,500	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	PAD Pelabuhan Wilayah IV (Rp.1000)	226,720.00	229,049,056	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV (Kg)	1,532,461.66	236,762,500	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV (Kg)	1,532,461.66	229,049,056	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)	8,300.94	236,762,500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)	8,300.94	229,049,056	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	1.00				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	1.00		
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH V				1,125,000,000	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV				1,104,677,400	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	1,086,300,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	1,084,367,400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	82,760,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	73,660,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	82,760,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	73,660,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	30,800,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	25,957,400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	30,800,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	25,957,400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	899,290,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	916,990,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	697,390,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	697,390,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	201,900,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	219,600,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	73,450,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	67,760,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	73,450,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	67,760,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	20,760,000	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	11,340,000	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	20,760,000	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	11,340,000	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	59,100.38	20,760,000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	59,100.38	11,340,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	PAD Pelabuhan Wilayah V (Rp.1000)	1,099,728.00	17,940,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	PAD Pelabuhan Wilayah V (Rp.1000)	1,099,728.00	8,970,000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah V (Kg)	1,200,000.00	17,940,000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah V (Kg)	1,200,000.00	8,970,000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil V	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1.00	17,940,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)	8,300.94	8,970,000	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH VI				1,020,000,000	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV				941,736,425	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	795,616,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	783,870,125	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	90,550,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	85,130,000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu APBD (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	RKPD Perubahan (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	90,550,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	85,130,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	150,001,390	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	132,129,765	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	150,001,390	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	132,129,765	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	514,424,610	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	531,388,360	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	416,944,610	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	415,448,360	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	97,480,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	115,940,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	40,640,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	35,222,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1.00	40,640,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1.00	35,222,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	135,948,000	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	86,181,300	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	135,948,000	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	86,181,300	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	746,895.21	135,948,000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	746,895.21	86,181,300	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	PAD Pelabuhan Wilayah VI (Rp.1000)	483,687.00	88,436,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	PAD Pelabuhan Wilayah VI (Rp.1000)	483,687.00	71,685,000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)	50,000.00	88,436,000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)	50,000.00	71,685,000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VI	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1.00	88,436,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1.00	71,685,000	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH VII				450,000,000	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH VII				357,164,480	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	250,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	196,290,480	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	50,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	48,226,765	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	50,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	48,226,765	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	19,200,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	9,181,525	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	19,200,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	9,181,525	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	100,800,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	91,692,190	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	30,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	26,460,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	70,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	65,232,190	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	80,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	47,190,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1.00	80,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1.00	47,190,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	100,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	96,750,000	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	100,000,000	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	96,750,000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu APBD (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	RKPD Perubahan (Rp)	Catatan Penting
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	252,127.04	100,000,000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	252,127.04	96,750,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)	100.00	100,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)	100.00	64,124,000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)	45,000.00	100,000,000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)	45,000.00	64,124,000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1.00	100,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1.00	64,124,000	
	TOTAL				101,039,894,277					56,472,432,046	

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Periode / Tahun : 2025

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Palu	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	68.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (dokumen)	3.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dok)	1.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	1	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan)	1.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	1.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palu	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1.00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (org)	3.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	48.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	5.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	11 kab/1 kota	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11 kab/ 1 kota	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	4 KKP	Luas kawasan konservasi perairan yang dicadangkan (Ha)	668,757	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	4,019	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11 kab/ 1 kota	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi (%)	100	
	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	11 kab/ 1 kota	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut (Dokumen)	1.00	
	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	12 kab/ 1 kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	250.00	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kelompok)	3.00	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (orang)	230.00	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11 kab/ 1 kota	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	2.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	253,705.54	
		12 kab/ 1 kota	Nilai Tukar Nelayan	100.00	diusulkan perubahan mengikuti kondisi lapang
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	11 kab/ 1 kota	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	< 50%	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	11 kab/ 1 kota	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	12	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	11 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	240.00	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 kabupaten	Produksi Perikanan PUD (ton)	3,017.48	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5 kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	5	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT</i>	11 kab/ 1 kota	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)	100.00	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	11 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (dokumen)	1.00	
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	11 Kab	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)	8.00	
				1.00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	11 Kab	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	2.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	870,000.00	
		12 kab/ 1 kota	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	97.20	
	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi (%)</i>	100.00	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	
	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi (%)	50.00	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	1.00	diusulkan perubahan menyesuaikan perubahan anggaran dan kesesuaian keadaan lapang
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	11 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	13 Kab	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	3.00	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	97.00	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	1.00	
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	1.00	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (unit)	5.00	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (unit)	132.00	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Olahan (Kg)	7,205,885.00	
	<i>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (%)	100.00	
	Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi (Rekomendasi)	1	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1.00	
	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	120.00	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (kegiatan)	25.00	
	<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi (%)	70.00	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)	1.00	
	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi (unit usaha)	7.00	
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Dokumen)	1.00	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administrasi & Sanksi Pidana (%)	50.00	
	<i>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pengawas Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompentensi mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (orang)	35.00	
	<i>Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani (perkara)	2.00	
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsii (pelaku usaha)	25.00	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/ atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/ atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	350.00	
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	30.00	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	11 kab/ 1 kota	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (kelompok masyarakat)	55	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	11 kab/ 1 kota	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya) yang terbina (kelompok)	6	
	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	6	
	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	UPTD Perbenihan	Jumlah produksi benih ikan dan udang bermutu (juta benih)	4.90	
		UPTD Perbenihan	Target PAD (Rp1000)	2,093,000.00	
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	UPTD Perbenihan	Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)	35,400.00	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	7.00	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	5.00	
	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Palu	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar Mutu Hasil Perikanan (%)	80.00	
	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	11.00	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5.00	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	12 kab/ 1 kota	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko (kegiatan)	3.00	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	

No.	Program / Kegiatan		Lokasi	indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	10.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	942.34	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	PAD Pelabuhan Wilayah I (Rp.1.000)	1,063,274.00	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah I (kg)	990,000.00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah I (balok)	187,458.00	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7.00	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	121,276.46	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	PAD Pelabuhan Wilayah II (Rp.1000)	1,089,957.00	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah II (Kg)	1,929,495.00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah II (balok)	4,400.00	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	1.00	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	117,167.33	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	PAD Pelabuhan Wilayah III (Rp.1000)	491,000.00	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah III (Kg)	673,655.00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah III (balok)	13,113.00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7.00	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	40,783.08	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	PAD Pelabuhan Wilayah IV (Rp.1000)	226,720.00	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV (Kg)	1,532,461.66	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)	8,300.94	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	1.00	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH V				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	59,100.38	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	PAD Pelabuhan Wilayah V (Rp.1000)	1,099,728.00	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah V (Kg)	1,200,000.00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)	8,300.94	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH VI				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	746,895.21	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	PAD Pelabuhan Wilayah VI (Rp.1000)	483,687.00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)	50,000.00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1.00	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH VII				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	252,127.04	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)	100.00	
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)	45,000.00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil VII	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1.00	

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Periode / Tahun : 2025
Prakiraan Maju : 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Palu	68	26,935,668,584	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi PD	68	28,024,756,252
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun (dokumen)	Palu	3	325,156,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	84	480,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	Palu	1	23,961,152,464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	100.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	Palu	1	55,377,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	75.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	Palu	1	332,795,669	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	100	24,894,756,252
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Palu	1	1,612,768,796	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	78.00	340,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Palu	1	648,418,155	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	65.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	11 kab/ 1 kota	100	1,701,237,915	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	70.00	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	11 kab/ 1 kota	80	1,373,653,915	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100.00	460,000,000
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi (%)	11 kab/ 1 kota	100	91,528,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	65.00	
	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	12 kab/ 1 kota	100	236,055,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	3	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	12 kab/ 1 kota	253705.537	10,375,388,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.1.01.106.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00	150,000,000
		Nilai Tukar Nelayan	12 kab/ 1 kota	100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	diusulkan perubahan mengikuti kondisi	5.1.01.106.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	50,000,000
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	11 kab/ 1 kota	< 50%	9,583,554,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.1.01.106.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.00	180,000,000
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang	11 kab/ 1 kota	100	91,834,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kematangan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	70.00	140,000,000
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)	11 Kab	8	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	3.00	1,130,000,000

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Palu	68	26,935,668,584	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi PD	68	28,024,756,252
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	12 kab/ 1 kota	870000	3,318,968,715				Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	84.00	
				Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	97.2		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	diusulkan perubahan menyesuaikan keadaan lapang	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100.00	460,000,000
			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah	12 kab/ 1 kota	100	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		BIDANG PERIKANAN TANGKAP			3,143,905,600
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	12 kab/ 1 kota	1	1,344,878,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	307,261.94	3,143,905,600
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	12 kab/ 1 kota	1	1,974,090,190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	304,147.10	900,000,000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Olahan (Kg)	12 kab/ 1 kota	7205885	1,257,384,859	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan darat (ton)	3,114.84	100,000,000
			Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (%)	12 kab/ 1 kota	100	74,729,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan (%)	25.00	1,343,905,000
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanan (unit)	12 kab/ 1 kota	120	641,158,467	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP			5,000,000,000
				Jumlah SKP yang difasilitasi (buah)	12 kab/ 1 kota	62		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	883,870.21	2,700,000,000
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi (%)	12 kab/ 1 kota	70	541,496,893	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang		
			Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	12 kab/ 1 kota	7	405,048,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.04.1.04 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang difasilitasi		
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan	12 kab/ 1 kota	50	2,789,959,549	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	produksi budidaya ikan di laut (ton)	707,096.17	1,950,000,000
			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pengawas Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompetensi mendukung Pengawasan Sumber Daya	12 kab/ 1 kota	35	2,713,133,549	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi (ton)	257,640.73	2,300,000,000
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah S	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya)	11 kab/ 1 kota	6	76,826,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi	100.00	210,000,000
			UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				2,393,062,352	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Produksi Perikanan Olahan (kg)	6,883,551.00	990,000,000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	12 kab/ 1 kota	90	1,389,742,352	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Rasio bahan baku industri pengolahan yang memenuhi standar jaminan mutu dan	0.65	1,100,000,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	12 kab/ 1 kota	1	76,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bidang Pengelolaan Ruang Laut			2,550,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	12 kab/ 1 kota	1	19,301,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan (%)	18	2,550,000,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12 kab/ 1 kota	1	1,188,460,412	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola (Ha)	739,292	1,600,000,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12 kab/ 1 kota	1	105,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Arah Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mil Dijuar Minyak	100	135,000,000

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Palu	68	26,935,668,584	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi PD	68	28,024,756,252
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi benih ikan dan udang bermutu (juta benih)	UPTD Perbenihan	4.9	1,003,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.02.1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	10	440,000,000	
			Target PAD (Rp1000)	UPTD Perbenihan	2093000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bidang PSKPD			2,800,000,000	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)	UPTD Perbenihan	35400	1,003,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya (%)	55	2,800,000,000	
		UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)					716,725,209	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tertanganinya pelanggaran KP (%)	100		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	Palu	90	545,552,084	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (%)	80		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	Palu	1	53,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Pengawas Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan	230	2,500,000,000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	Palu	1	4,909,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	Persentase kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD	30	300,000,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Palu	1	427,287,034		UPTD PMHP			850,000,000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Palu	1	60,255,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00	250,000,000	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar Mutu Hasil Perikanan (%)	12 kab/ 1 kota	80	171,173,125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		97.00	15,930,000	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	12 kab/ 1 kota	11	171,173,125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100.00	5,200,000	
		UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				1,410,935,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00	227,800,000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	90	1,218,709,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00	1,070,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	79,873,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pelaku usaha KP yang menerapkan Standar Mutu Perikanan (%)	50.00	600,000,000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	18,110,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Inovasi yang diterapkan (inovasi)	1.00	600,000,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	1,065,705,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	UPT PERBENIHAN			3,350,000,000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	55,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00	850,000,000	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100	28,285,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			70,000,000	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80	28,285,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10,000,000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD Pelabuhan Wilayah I (Rp.1.000)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1,063,274.00	163,940,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			484,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Palu	68	26,935,668,584	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi PD	68	28,024,756,252
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah I (kg)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	990,000.00	163,940,600		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	PAD (Rp. 1000)	2,000,000.00	2,500,000,000
			UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II				1,311,072,672	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih (juta ekor)	1.50	2,500,000,000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	90	1,194,077,972	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Budidaya (Kg)	26000.00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	73,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	UPT WILAYAH I			1,900,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	31,938,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00	900,000,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	861,416,832	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			68,640,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	226,912,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28,154,228
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100	92,622,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			762,395,272
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80	92,622,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40,810,500
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD Pelabuhan Wilayah II (Rp.1000)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1,089,957.00	24,372,400		3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PAD (Rp1.000)	1,096,854.00	650,000,000
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah II (Kg)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1,929,495.00	24,372,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I	47.00	350,000,000
			UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III				1,072,587,845	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	- Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (WIL I)	55.00	350,000,000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	90	942,160,645	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	UPT WILAYAH II			1,500,000,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	68,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.80	600,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	26,284,339	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25,000,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	752,593,756	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25,000,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	94,642,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			515,000,000
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100	25,102,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35,000,000
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80	25,102,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PAD (Rp1.000)	1,033,500.00	550,000,000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD Pelabuhan Wilayah III (Rp.1000)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	491,000.00	105,324,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	2,025,965.00	550,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Palu	68	26,935,668,584	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi PD	68	28,024,756,252
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah III (Kg)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	673,655.00	105,324,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	- Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (WIL II)	55	350,000,000
			UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV				785,861,741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	UPT WILAYAH III			1,450,000,000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	90	506,997,935	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00	550,000,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	75,415,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			68,640,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	37,321,575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Umum Perangkat Daerah			15,000,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	337,095,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			428,200,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	57,166,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38,160,000
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100	49,814,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PAD (Rp1.000)	495,000.00	550,000,000
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80	49,814,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	598,250.00	550,000,000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV (Kg)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	1532461.66	229,049,056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah III	56.50	350,000,000
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah IV (pelabuhan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	229,049,056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	UPT WILAYAH IV			1,050,000,000
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)		1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00	250,000,000
			UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV				1,104,677,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,000,000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	90	1,084,367,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10,000,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	73,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			210,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	25,957,400		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25,000,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	916,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PAD (Rp1.000)	260,000.00	450,000,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	67,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	1,542,462.00	450,000,000
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100	11,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah IV	58.00	350,000,000
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80	11,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	- Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (WIL	55.00	350,000,000

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Palu	68	26,935,668,584	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi PD	68	28,024,756,252
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD Pelabuhan Wilayah IV (Rp.1000)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah IV	226,720.00	8,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		UPT WILAYAH V			1,650,000,000
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV (Kg)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1,532,461.66	8,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		97.00	64,560,000
			UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH V				1,097,262,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Administrasi Umum Perangkat Daerah		97.00	3,500,000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah IV	90	1,068,622,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97.00	669,940,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	64,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97.00	12,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	39,105,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PAD (Rp1.000)	800,000.00	550,000,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	762,175,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	941,845.00	550,000,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	202,781,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah V	47.00	350,000,000
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100	19,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	- Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (WIL V)	55.00	350,000,000
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80	19,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		UPT WILAYAH VI			1,550,000,000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD Pelabuhan Wilayah V (Rp.1000)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah V	1,099,728.00	8,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00	600,000,000
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah V (Kg)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1,200,000.00	8,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		97.00	100,000,000
			UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH VI				960,936,425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Administrasi Umum Perangkat Daerah		97.00	3,500,000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah V	83	715,146,125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97.00	669,940,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	104,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97.00	12,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	196,650,615	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PAD (Rp1.000)	800,000.00	550,000,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	378,933,510	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	941,845.00	550,000,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil	1	35,222,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah V	47.00	350,000,000
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100	169,315,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	- Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (WIL V)	55.00	350,000,000
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80	169,315,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		UPT WILAYAH VI			1,550,000,000

[illegible]

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2025

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan PDRB, Produktivitas Ekonomi Daerah dan kualitas pemanfaatan ruang sektor KP	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan										
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan SDKP yg berkelanjutan										
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan SDKP yg berkelanjutan										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	67.44	68.00	26,935,668,584	Sekretariat	Palu, 13 kab/kota, luar daerah
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (dokumen)	3	3.00	325,156,000		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	2.00	174,764,000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dok)	1	1.00	150,392,000		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1	1.00	23,961,152,464		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	1	1	23,396,378,589		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1.00	450,000,000		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (laporan)	1	1.00	3,900,000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	1.00	49,033,750		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	1	1.00	61,840,125		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1	1.00	55,377,500		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (org)	0	3.00	55,377,500		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1.00	332,795,669		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1.00	220,755,999		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	1.00	51,039,670		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	1.00	61,000,000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1.00	1,612,768,796		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1.00	788,343,796		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1.00	824,425,000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1.00	648,418,155		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48	48.00	274,850,000		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	48	48.00	180,935,655		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	4	5.00	192,632,500		
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100	100.00	1,701,237,915	Bidang Pengelolaan Ruang Laut	Palu, 12 kab/kota, luar daerah
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	70	80.00	1,373,653,915		
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi perairan yang dicadangkan (Ha)	N/A	668757.48	132,430,000		
					Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3230.2	4018.75	1,241,223,915		
					Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi (%)	100	100	91,528,100		
					Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut (Dokumen)	1	1.00	91,528,100		
					Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kelompok masvarakat yang terbina di WP3K (%)	100	100	236,055,900		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	200	250			
					Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kelompok)	3	3	97,555,000		
					Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (orang)	0	230	138,500,900		
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	0	2			
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	291,013.15	253,705.54	10,375,388,700	Bidang Perikanan Tangkap	Palu, 12 kab/kota
						Nilai Tukar Nelayan	93.58	100.00			
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	< 50%	< 50%	9,583,554,700		
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	12	12.00	472,640,000		
					Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	220	240.00	9,110,914,700		
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produksi Perikanan PUD (ton)	1,623.45	3,017.48	91,834,000		
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	N/ A	5.00	91,834,000		
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	220				
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)	100	100.00	-		
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (dokumen)	1	1.00			

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)	8	8.00	700,000,000		
					Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan)	0	1.00			
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	2	2.00	700,000,000		
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	803,370.46	870,000.00	3,318,968,715	Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP	Palu, 13 kab/kota
						Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	92.01	97.20			
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi (%)	0	100.00	-		
					Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	1			
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi (%)	0	50	-		
					Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	1			
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	12	1.00	1,344,878,525		
					Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1				
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	0	3.00	308,613,875		
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	50	97	1,036,264,650		
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	0	1			
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	13	1.00	1,974,090,190		
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	3	5.00	71,152,750		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	90	132.00	1,902,937,440		
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Olahan (Kg)	6,844,871.00	7,205,885.00	1,257,384,859	Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP	Palu, 13 kab/kota
					Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (%)	100	100.00	74,729,500		
					Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar (rekomendasi)	1	1	45,335,500		
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1	1.00	29,394,000		
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	15	120.00	641,158,467		
					Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saine (kegiatan)	N/A	25.00	641,158,467		
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi (%)	70	70.00	541,496,893		
					Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)	1	1.00	136,448,813		
					Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi (unit usaha)	7	7.00	405,048,080		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Dokumen)	0	1.00			
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administrasi & Sanksi Pidana (%)	100	50.00	2,789,959,549	Bidang PSDKP	Palu, 13 kab/kota
					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasn Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompetensi mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (orang)	35	35.00	2,713,133,549		
					Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani (perkara)	N/A	2.00	296,512,499		
					Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	N/A	25.00	202,068,500		
					Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	N/A	350.00	958,612,550		
					Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	N/A	30.00	221,140,000		
					Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (kelompok masyarakat)	30	55.00	1,034,800,000		
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya) yang terbina (kelompok)	N/A	6.00	76,826,000		
					Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	N/A	6.00	76,826,000		
					UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				2,393,062,352		Palu, Sigi, Poso,
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	88	90.00	1,389,742,352		Parigi Moutong

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1	1.00	76,800,000		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1.00	76,800,000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1.00	19,301,940		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1.00	19,301,940		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1.00	1,188,460,412		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1.00	572,010,412		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1.00	616,450,000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1.00	105,180,000		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	NA	5.00	105,180,000		
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi benih ikan dan udang bermutu (juta benih)	1.58	4.90	1,003,320,000		
						Target PAD (Rp1000)	1,455,165.00	2,093,000.00			
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)	25,195.00	35,400.00	1,003,320,000		
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	7	7.00	789,880,000		
					Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	4	5	213,440,000		
					UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				716,725,209		Palu, 13 kab/Kota
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	83.54	90	545,552,084		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1	1	53,100,000		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1	53,100,000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1	4,909,350		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	4,909,350		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2025				
						Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1	427,287,034		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1	167,882,034		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1	259,405,000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1	60,255,700		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	NA	5.00	60,255,700		
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar Mutu Hasil Perikanan (%)	70	80.00	171,173,125		
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	10	11.00	171,173,125		
				Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (kegiatan)	N/A	5.00	59,862,875		
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko (kegiatan)	N/A	3.00	111,310,250		
				UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				1,410,935,600		Palu, Donggala
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90.00	1,218,709,300		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1.00	79,873,350		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1.00	79,873,350		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1.00	18,110,650		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1.00	18,110,650		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1.00	1,065,705,300		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1.00	829,905,300		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1.00	235,800,000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1.00	55,020,000		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		10.00	55,020,000		
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100.00	28,285,700		
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80.00	28,285,700		
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		942.34	28,285,700		
					PROGRAM PENGELOLAAN	PAD Pelabuhan Wilayah I (Rp.1.000)		1,063,274.00	163,940,600		
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah I (kg)		990,000.00	163,940,600		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah I (balok)		187458.00	163,940,600		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)		7.00			
					UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II				1,311,072,672		Palu, Parigi
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90.00	1,194,077,972		Moutong, Poso
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1.00	73,810,000		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1.00	73,810,000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1.00	31,938,150		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1.00	31,938,150		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1.00			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1.00	861,416,832		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1.00	555,841,832		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1.00	305,575,000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1.00	226,912,990		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		5.00	226,912,990		
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100.00	92,622,300		
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80.00	92,622,300		
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		121276.46	92,622,300		
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD Pelabuhan Wilayah II (Rp.1000)		1,089,957.00	24,372,400		
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah II (Kg)		1,929,495.00	24,372,400		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah II (balok)		4400	24,372,400		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)		1.00			
					UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III				1,072,587,845		Palu, Luwuk
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90.00	942,160,645		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1.00	68,640,000		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1.00	68,640,000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1.00	26,284,339		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1.00	26,284,339		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1.00	752,593,756		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1.00	492,151,256		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1.00	260,442,500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	94,642,550		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2.00	94,642,550		
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100.00	25,102,600		
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80.00	25,102,600		
				Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	117,167.33	25,102,600		
				PROGRAM PENGELOLAAN	PAD Pelabuhan Wilayah III (Rp.1000)	491,000.00	105,324,600		
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah III (Kg)	673,655.00	105,324,600		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah III (balok)	13,113.00	105,324,600		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7.00			
				UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV			785,861,741		Palu, Morowali Utara
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90	506,997,935		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1.00	75,415,000		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1.00	75,415,000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1.00	37,321,575		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1.00	37,321,575		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	337,095,360		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.00	211,695,360		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1.00	125,400,000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1.00	57,166,000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	57,166,000		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100.00	49,814,750		
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80.00	49,814,750		
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		40,783.08	49,814,750		
					PROGRAM PENGELOLAAN	PAD Pelabuhan Wilayah IV (Rp.1000)		226,720.00	229,049,056		
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV (Kg)		1,532,461.66	229,049,056		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)		8,300.94	229,049,056		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)		1.00			
					UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH V				1,104,677,400		Palu, Buol
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90.00	1,084,367,400		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1.00	73,660,000		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1.00	73,660,000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1.00	25,957,400		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1.00	25,957,400		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1.00	916,990,000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1	697,390,000		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1.00	219,600,000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1.00	67,760,000		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		5.00	67,760,000		
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100.00	11,340,000		
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80.00	11,340,000		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		59,100.38	11,340,000		
					PROGRAM PENGELOLAAN	PAD Pelabuhan Wilayah V (Rp.1000)		1,099,728.00	8,970,000		
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah V (Kg)		1,200,000.00	8,970,000		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)		8,300.94	8,970,000		
					UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH VI				941,736,425		Palu, Banggai Laut, Banggai Kepulauan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90.00	783,870,125		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1.00	85,130,000		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1.00	85,130,000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1.00	132,129,765		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1.00	132,129,765		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1.00	531,388,360		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1.00	415,448,360		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1.00	115,940,000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1.00	35,222,000		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		1.00	35,222,000		
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100.00	86,181,300		
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80.00	86,181,300		
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		746,895.21	86,181,300		
					PROGRAM PENGELOLAAN	PAD Pelabuhan Wilayah VI (Rp.1000)		483,687.00	71,685,000		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2025				
								Target	Rp			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)		50,000.00	71,685,000			
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)		1.00	71,685,000			
					UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH VII							Palu, Morowali
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90.00	196,290,480			
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1.00	48,226,765		
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1.00	48,226,765		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1	9,181,525			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1.00	9,181,525			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1.00	91,692,190			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1.00	26,460,000			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1.00	65,232,190			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1.00	47,190,000			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		1.00	47,190,000			
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100.00	96,750,000			
						Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80.00	96,750,000		
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		252,127.04	96,750,000			
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)		100.00	64,124,000			
						Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)		45,000.00	64,124,000		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)		1.00	64,124,000			
					TOTAL				56,472,432,046			